

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19
DI ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

JESIKA METIARA FITRI

NIM. 180801083

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jesika Metiara Fitri
NIM : 180801083
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 1-2-2000
Alamat : Lieue, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN-Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 1 Desember 2022
Yang Menyatakan,

Jesika Metiara Fitri
NIM. 180801083

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19

DI ACEH BESAR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

JESIKA METIARA FITRI

NIM. 180801083

Mahasiswi Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/di munaqasyah kan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ernita Dewi, S.Ag.,M.Hum

NIP. 19730723000032002


Melly Masni, M.I.R.

NIP. 199305242020122016

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI ACEH BESAR

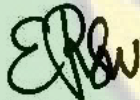
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik
Pada Hari Tanggal: Kamis, 01 Desember 2022

Banda Aceh,

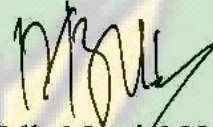
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum.
NIP. 197307232000032002

Sekretariat



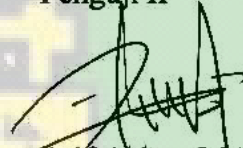
Melly Masni, M.I.R.
NIP. 199305242020122016

Penguji I



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP.198401012015031003

Penguji II



Arif Akbar, MA.
NIP.199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Darussalam Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan atas keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul “*Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar*”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Kedua orang Tua Tercinta, nenek, abang, adik-adik dan Keluarga Besar yang telah mendoakan dan menyemangati, baik dari segi material maupun nonmaterial.
3. Prof. Dr.Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, S.Ag. M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Rizkika Lhena Darwin M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, MA. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik.

6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Ernita Dewi. S.Ag. M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Melly Masni. M.I.R. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Politik angkatan 2018 terutama Mikial Bulkia, Ningrum, Laila Sapuan, yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada informan yang telah banyak membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 1 Desember 2022
Penulis,

Jesika Metiara Fitri
NIM. 180801083

ABSTRAK

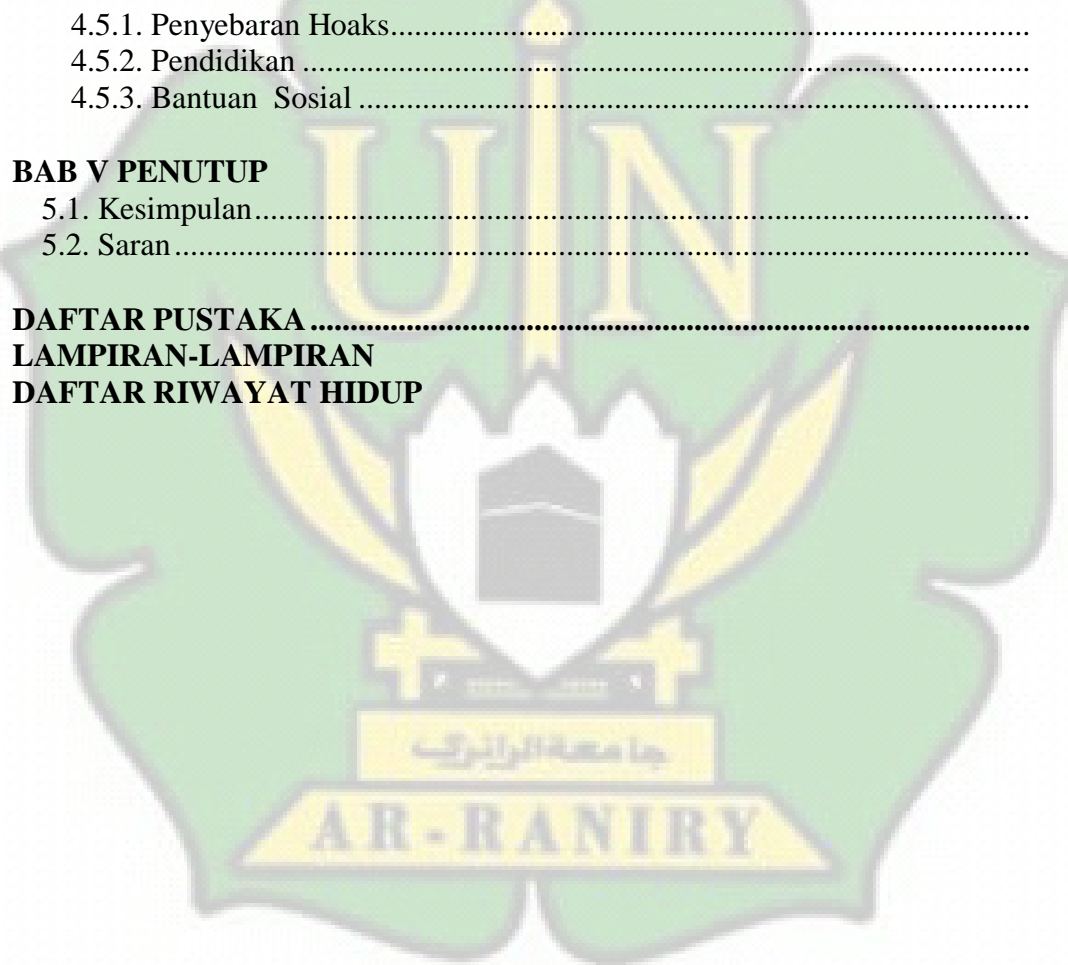
Vaksin Covid-19 sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus corona. Maka dari itu, vaksinasi dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. Salah satu kabupaten yang tercatat memiliki tingkat vaksinasi Covid-19 yang rendah adalah Kabupaten Aceh Besar. Tercatat bahwa tingkat vaksinasinya hanya mencapai 18.05 persen per Oktober 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimanakah implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar, bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar, serta faktor apa saja yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang dilakukan dengan subjek yang terlibat dan menghasilkan analisis yang lebih deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah meliputi penyebaran informasi kepada masyarakat, pelibatan seluruh stakeholder, menjadi kelompok yang pertama kali divaksinasi, serta mengadopsi peraturan vaksinasi yang berasal dari pusat. Beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut di antaranya adalah luas wilayah Aceh Besar yang menghambat penyebaran informasi, kendala jaringan internet dalam penginputan data, serta adanya oknum-oknum yang memfasilitasi pembuatan sertifikat vaksinasi ilegal. Respon masyarakat terbagi 2 yaitu pro terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 dan kontra terhadap Vaksinasi Covid-19. Adapun yang mempengaruhi respon tersebut antara lain berupa isu hoaks, tingkat pendidikan, serta dana sosial. Kesimpulannya implementasi kebijakan dilakukan dengan berbagai cara agar masyarakat mau divaksin dan percaya akan keefektifitas vaksin. Tetapi masih ada masyarakat yang tidak percaya akan efektifitas vaksin Covid-19 karena berbagai alasan.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, vaksinasi, Aceh Besar,

DAFTAR ISI

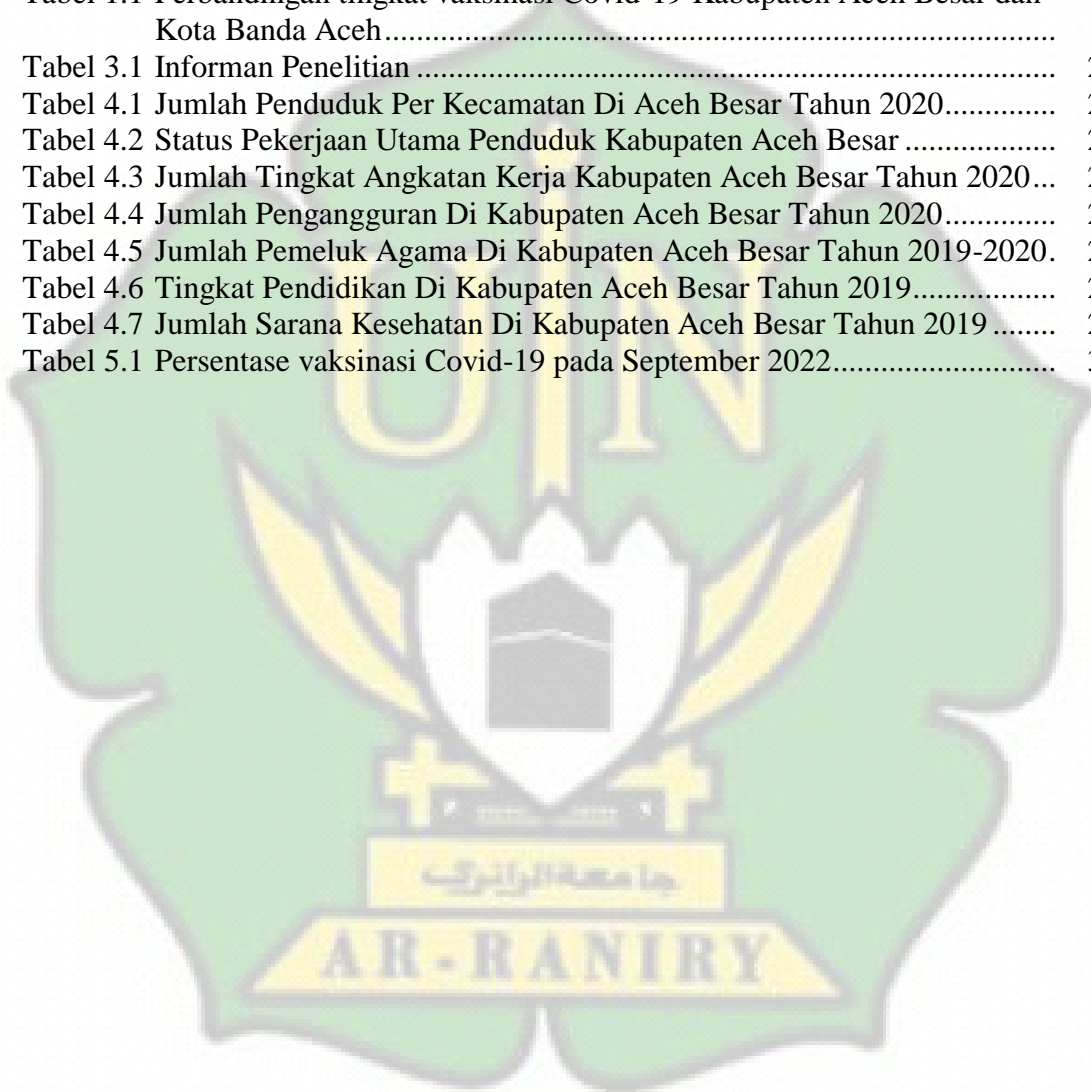
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Konsep Implementasi Kebijakan.....	10
2.1.2. Teori Penanaman (Caltivation Theory) Kebijakan.....	14
2.2. Pembahasan Penelitian Yang Relevan	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	19
3.2. Fokus Penelitian	20
3.3. Lokasi Penelitian	20
3.4. Jenis dan Sumber Data	21
3.5. Informan Penelitian	21
3.6. Teknik Pengumpulan Data	23
3.6.1. Interview (wawancara).....	23
3.6.2. Observasi.....	23
3.6.3. Dokumen.....	24
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	24
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Profil Kabupaten Aceh Besar	25
4.1.1. Jumlah Penduduk Dan Kondisi Ekonomi.....	25
4.1.2. Agama.....	29
4.1.3. Pendidikan Dan Kesehatan	29
4.2. Capaian vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar	30
4.3. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Aceh Besar	32
4.3.1. Komunikasi.....	32

4.3.2. Sumber Daya.....	37
4.3.3. Disposisi.....	40
4.3.4. Struktur Birokrasi	44
4.4. Respon Masyarakat Aceh Besar Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19	47
4.4.1. Masyarakat Pro-Vaksinasi Covid-19.....	47
4.4.2. Masyarakat Kontra Vaksinasi Covid-19.....	50
4.5. Faktor Yang Mempengaruhi Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Aceh Besar.....	54
4.5.1. Penyebaran Hoaks.....	54
4.5.2. Pendidikan	56
4.5.3. Bantuan Sosial	57
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan tingkat vaksinasi Covid-19 Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.....	6
Tabel 3.1 Informan Penelitian	21
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Aceh Besar Tahun 2020.....	25
Tabel 4.2 Status Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Aceh Besar	26
Tabel 4.3 Jumlah Tingkat Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020...	27
Tabel 4.4 Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020.....	28
Tabel 4.5 Jumlah Pemeluk Agama Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2020.	28
Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019.....	29
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019	29
Tabel 5.1 Persentase vaksinasi Covid-19 pada September 2022.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS Cov-2. Virus ini pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 yang bermula di Wuhan, Cina. Penyakit ini menyerang seluruh dunia yang mengakibatkan terganggunya seluruh aktivitas perekonomian dan perpolitikan serta berdampak luas terhadap kesehatan di seluruh belahan dunia. Covid-19 menyebabkan kematian dalam jumlah yang sangat drastis. Jumlah kasus dan korban jiwa dari pandemi Covid-19 masih terus bertambah di seluruh dunia. Dilaporkan hingga 2 Desember 2021, jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 262.938.575 orang dan yang dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19 telah mencapai 5.22.536 jiwa.¹

Covid-19 menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi, yang telah menimbulkan berbagai dampak pada bidang ekonomi, pendidikan dan kehidupan sosial. Kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 4,26 juta jiwa dan yang telah meninggal dunia mencapai 144 ribu jiwa hingga 2 Desember 2021. Jumlah ini adalah jumlah yang sangat tinggi yang menempatkan

¹merdeka.com, jumlah kematian covid seluruh dunia, Diakses melalui situs: <https://m.merdeka.com/jumlahkematiancovidiseluruhdunia>, pada tanggal: 29 september 2021, pukul: 09.45 wib

Indonesia sebagai negara dengan kasus Covid-19 tertinggi nomor 7 di dunia. Kasus Covid-19 di Indonesia sendiri diperkirakan terus bertambah meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan penyakit ini.

Pemerintah pusat sudah melakukan berbagai upaya² untuk menanggulangi penyebaran Covid- 19. Berbagai upaya pencegahan pemutusan mata rantai Covid-19 telah dilakukan melalui pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro) dan PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat), dan penetapan zona di berbagai daerah).

Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Aceh juga mengalami penyebaran kasus Covid-19 yang cukup tinggi di mana sebanyak 38.414 ribu jiwa dilaporkan telah terjangkit virus ini. Terhitung 1 Desember 2021, jumlah korban yang meninggal telah mencapai 2.066 jiwa. Adapun jumlah suspek Covid-19 per-30 November 2021 mencapai 9.956 jiwa (suspek covid-19 adalah orang yang diduga kuat terjangkit infeksi virus Covid-19 telah menunjukkan gejala terinfeksi dan pernah kontak dekat dengan pasien positif virus Covid-19 atau suspek juga merupakan istilah pengganti untuk pasien dalam pengawasan). Di Kabupaten Aceh Besar sendiri kasus Covid-19 mencapai 5.881 jiwa, di mana korban yang dinyatakan meninggal dunia telah

² Wahidah, Idah. DKK. *Pandemic covid 19: analisis perencanaan pemerintah dalam berbagai upaya pencegahan*. Jurnal manajemen dan organisasi. 2020 (11). H: 179-188.

mencapai 303 jiwa, sementara yang terdeteksi sebagai suspek covid-19 dilaporkan mencapai 183 jiwa.³ Jumlah ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan.

Sebagaimana dilaporkan bahwa Covid-19 telah menjadi kekhawatiran di seluruh belahan dunia, negara-negara di seluruh dunia terus berusaha untuk menemukan vaksin yang tepat untuk menanggulangi dan menghentikan Covid-19 yang terus menyebar. Para ilmuwan dari berbagai negara berusaha untuk menemukan vaksin yang diharapkan dapat mengatasi Virus Corona yang semakin menyebar. Vaksin Covid-19 sendiri bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, di mana diharapkan dapat memberi perlindungan tubuh dan memberikan kekebalan spesifik dalam tubuh dengan adanya vaksinasi tersebut. Di Indonesia sendiri, ada berbagai macam varian vaksin Covid-19 yang digunakan, di antaranya adalah *sinovac 1*, *sinovac 2*, *astrazeneca*, *moderna*, *pfizer*, dan *sinopharm*. Semua vaksin diklaim mempunyai manfaat yang sama untuk meningkatkan antibodi dalam melawan virus Corona penyebab Covid-19.

Implementasi kebijakan vaksin di Indonesia sendiri pertama kali dilakukan pada Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, dan seluruh pejabat negara. Pada tahap awal, vaksinasi Covid-19 dilakukan kepada seluruh tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang menjalankan pendidikan profesi dokter, dan seluruh petugas pelayanan publik yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait Covid-19.

³ <https://covid19.acehprov.go.id>. Diakses pada tanggal 29 september 2021, pukul: 09.40 wib

Selanjutnya, vaksinasi dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, yang dianggap sebagai bentuk perlindungan nasional. Hal ini tertuang dalam Permenkes No. 23 tahun 2021 mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan enggan melakukan vaksinasi.⁴ Di Provinsi Aceh sendiri, total vaksinasi dosis 1 di Aceh mencapai 28,07 persen atau diikuti oleh 1,13 juta peserta vaksin. Sedangkan untuk vaksinasi dosis 2, tercatat baru mencapai 14,37 persen atau sebanyak 578,8 ribu peserta vaksin menurut data pada tanggal 17 Oktober 2021. Pemerintah Aceh sendiri menargetkan vaksinasi Covid 19 di Provinsi Aceh bisa mencapai 4 juta jiwa atau setara dengan 80 persen dari penduduk Aceh. Sebagian wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih mencatat tingkat vaksinasi yang cukup rendah dari wilayah kabupaten di provinsi lain di Indonesia. Capaian vaksinasi Covid-19 di Provinsi Aceh masih sangat minim, dan ini berdampak pada skor pengendalian Covid-19.⁵

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Kemenkes Aceh sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terkait Covid-19 menjadi faktor utama rendahnya tingkat vaksinasi di Aceh dikarenakan masyarakat

⁴ Astuti, ning puji. 2021. *Persepsi masyarakat terhadap penerimaan vaksinasi covid 19*. Jurnal keperawatan 13(3). Hal: 569-580.

⁵ [cnnindonesia.com, Aceh dan NTT jadi wilayah vaksinasi covid-19 terendah](https://www.cnnindonesia.com/acehdannttjadiwilayahvaksinasicovid19%20terendah), Diakses melalui situs: [https://www.cnnindonesia.com/acehdannttjadiwilayahvaksinasicovid19 terendah](https://www.cnnindonesia.com/acehdannttjadiwilayahvaksinasicovid19%20terendah) pada tanggal 29 september 2021, pukul: 10.00 wib

tidak percaya dengan kehalalan vaksin.⁶ Sebagian besar masyarakat Aceh masih mempercayai bahwa vaksin Covid-19 haram.⁷ Selain itu, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap eksistensi dari virus Covid-19 sehingga mereka menganggap bahwa Covid-19 hanyalah akal-akalan pemerintah. Berbagai isu negatif tersebut telah menyebabkan sebagian masyarakat Aceh enggan untuk divaksin.⁸ Hal tersebut diperparah dengan isu mengenai dampak negatif vaksin Covid-19 yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa, kelumpuhan, dan berbagai efek samping lainnya terhadap orang-orang dengan penyakit bawaan seperti jantung, diabetes dan darah tinggi.⁹

Hal ini menyebabkan pemerintah Aceh berupaya untuk meningkatkan vaksinasi di seluruh kabupaten dan kota. kabupaten yang tercatat memiliki tingkat vaksinasi Covid-19 yang rendah adalah Aceh Utara dengan tingkat vaksin 16 persen, Pidie 17,6 persen dan Kabupaten Aceh Besar tingkat vaksinasinya baru mencapai 18.05 persen per Oktober 2021. Padahal program vaksinasi di kabupaten Aceh Besar ini direncanakan menyasar sebanyak 307.32 ribu atau setara dengan 70 persen peserta. Namun hingga Oktober 2021, tercatat jumlah peserta yang telah melakukan vaksinasi

⁶ dari suara.com, kemenkes ungkap alasan tingkat vaksinasi covid di aceh rendah, Diakses melalui situs: <https://darisuara.com/alasanvaksinasicoviddiacehrendah> pada tanggal 29 september 2021, pukul: 10.05 wib

⁷ Bbc.com, vaksin Astrazeneca haram, tetapi boleh digunakan:kepercayaan publik dikhawatirkan berkurang, pemerintah diminta mengedukasi publik. Diakses melalui situs: <https://www.bbc.com/vaksinastrazenekaharam:pemerintahdimintamengedukasi publik>, pada tanggal: 4 april 2021, pukul:10.30

⁸ Novita, astrid. Dan Nur Risky Ramadhani. 2021. *Webinar Vaksinasi covid 19 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat*. Jurnal pengabdian kesehatan masyarakat. 1(1).hal: 29-33.

⁹ dari suara.com, kemenkes ungkap alasan tingkat vaksinasi covid di aceh rendah, Diakses melalui situs: <https://darisuara.com/alasanvaksinasicoviddiacehrendah> pada tanggal 29 september 2021, pukul: 10.05 wib

Covid-19 hanya sebanyak 450 peserta yang menyebabkan jumlah stok vaksin tersisa cukup banyak, yaitu sebesar 22.537 dosis vaksin. Padahal, Aceh Besar merupakan kabupaten yang paling dekat dengan ibu kota Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh yang memiliki angka vaksinasi paling tinggi di seluruh Aceh.¹⁰ Di Banda Aceh, jumlah masyarakat yang telah melakukan vaksin pada tahap pertama (vaksin pertama) 154,692 orang atau sebesar 81 persen. Dengan jumlah sasaran vaksinasi sebanyak 190,289 orang¹¹ pada 30 Oktober 2021.

Tabel 1.1
Perbandingan tingkat vaksinasi Covid-19 (Data Oktober 2021)

Kabupaten/kota	Persentase Vaksinasi
Aceh Utara	16%
Pidie	17%
Aceh Besar	18.05 %
Banda Aceh	81 %

¹⁰ diskominfo.bandaacehkota.com, banda aceh tertinggi vaksinasi seaceh, Diakses melalui situs: <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/09/16/presiden-banda-aceh-tertinggi-vaksinasi-se-aceh/> pada tanggal 29 september 2021, pukul: 10.25 wib

¹¹ Dinkes,acehprov.go.id. diakses pada tanggal 29 september 2021

Meskipun merupakan kabupaten yang paling dekat dengan ibu kota Provinsi Aceh, perbedaan tingkat vaksinasi antara Aceh Besar dan Banda Aceh cukup signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar serta bagaimana pandangan masyarakat Aceh Besar terhadap vaksinasi Covid-19.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mengimplementasikan kebijakan vaksinasi. Meskipun tidak melakukan pemaksaan terhadap kebijakan tersebut, pemerintah cukup gencar melakukan sosialisasi mengenai vaksinasi yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dari Covid-19. Selain itu, sosialisasi dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Covid-19 sudah teruji kehalalannya untuk menghilangkan keresahan masyarakat mengenai kehalalan vaksin. Untuk menambah keyakinan masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menginstruksikan semua birokrat dan yang bekerja di pemerintahan untuk divaksin dimana hampir seluruh pegawai negeri sipil di Aceh Besar telah melakukan vaksinasi.

Di samping itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar juga menginstruksikan agar setiap tenaga kesehatan di puskesmas-puskesmas Kabupaten Aceh Besar untuk divaksin karena mereka merupakan pelayan masyarakat yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana kebijakan vaksin Covid-19 di Aceh Besar. Terutama mengenai berbagai tantangan yang

dihadapi oleh pemerintah dalam penerapan kebijakan vaksin dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan kebijakan vaksin Covid-19 di Aceh Besar, serta respon masyarakat dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar?
3. Apa yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan vaksin di Aceh Besar
2. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat Aceh Besar dalam penerapan kebijakan vaksin
3. Untuk mengetahui apa saja yang mengetahui apa saja yang mempengaruhi respon masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Vaksinasi Covid-19

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis,

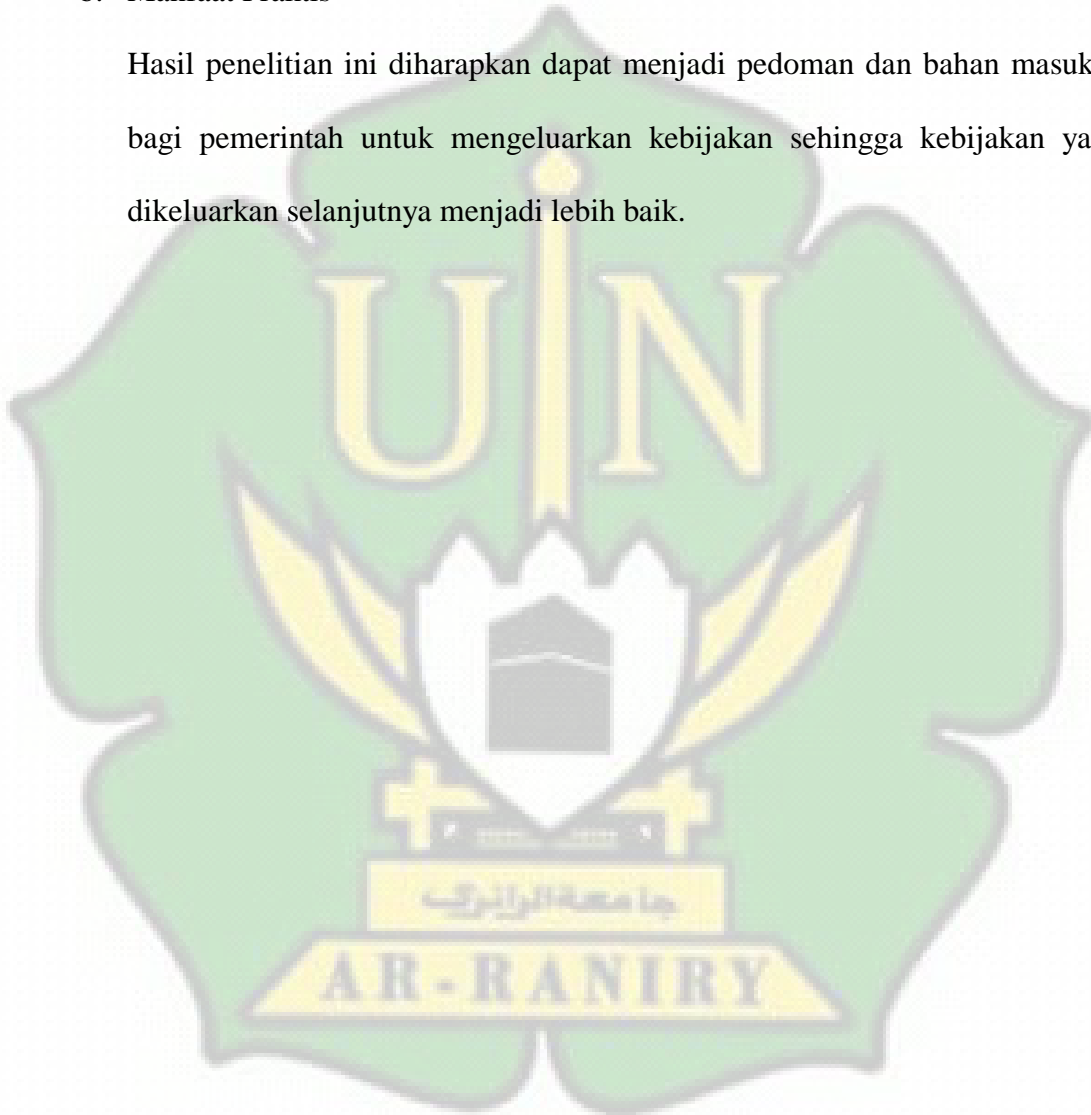
a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu dan menjadi rujukan bagi kajian selanjutnya, serta menjadi acuan penelitian ilmu politik

yang berkualitas. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber referensi terkait penelitian serupa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan masukan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan sehingga kebijakan yang dikeluarkan selanjutnya menjadi lebih baik.



BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Implementasi Kebijakan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan), berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).¹²

Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai apabila kebijakan publik sudah dikeluarkan dan telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan beberapa faktor yaitu: Komunikasi, struktur birokrasi, ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan antar pelaksana. Implementasi kebijakan tidak terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi juga melibatkan semua pihak yang

¹² Dwi nurani, Tesis: “Analisis implementasi program bantuan operasional sekolah dasar negeri di kota Jakarta selatan”. Jakarta: UI.

terlibat sehingga mencapai tujuan yang diinginkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan semestinya.

Dalam melihat implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan awal, penulis menggunakan model implementasi kebijakan George Charles Edward III. Menurut Edward III implementasi diartikan sebagai tahap dalam proses kebijakan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan.

Dalam model yang dikembangkannya, Edward III mengemukakan 4 faktor krisis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Ke-4 variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu variabel untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang diinginkan. Sasaran kebijakan harus diberikan informasi mengenai kebijakan yang akan ditetapkan.¹³ Menurut Edward III Faktor-faktor yang mempengaruhi informasi ada 3 yaitu: *Transmisi Komunikasi* (penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik), *Kejelasan Komunikasi* (komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar pelaksanaan berjalan sesuai yang diinginkan), *Konsistensi Komunikasi* (implementasi kebijakan haruslah jelas dan sesuai pelaksanaan awal,

¹³ Dwi nurani, Tesis: “Analisis implementasi program bantuan operasional sekolah dasar negeri di kota Jakarta selatan”. Jakarta: UI,

konsisten pada hal ini mengenai sikap, persepsi, dan respon dari implementor dalam pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan yang akan dijalankan).

b. Sumber daya

Sumber daya juga menjadi hal penting untuk menyukseskan implementasi kebijakan, menurut Edward III sumber daya ada 4 kriteria yang harus dimiliki yaitu, *kecukupan dan kualifikasi* (sumber daya manusia yang akan menjalankan kebijakan haruslah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan kebijakan yang akan dijalankan. Kekurangan SDM dan kurangnya kemampuan dan keterampilan dapat mempengaruhi jalannya kebijakan). *Kewenangan* (wewenang yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan yang telah diamanatkan kepada sumber daya manusia tersebut). *Informasi* (informasi yang harus disampaikan kepada sumber daya manusia untuk melakukan kebijakan yang akan dijalankan dalam bentuk tulisan/pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan kebijakan). *sarana dan prasarana* (sarana dan prasarana yang tersedia dalam menjalankan kebijakan yang digunakan untuk mendukung secara langsung agar kebijakan dapat terlaksana dengan semestinya).

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari implementor kebijakan. Implementor harus mendukung dan mempunyai tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan kepada masyarakat. Menurut Winarno jika pelaksana kebijakan mempunyai sikap baik dalam hal ini dengan adanya dukungan, implementasi kebijakan akan berjalan

sesuai dengan yang diinginkan atau tujuan awal dari pembuatan kebijakan.¹⁴ Sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan haruslah menerima dan melaksanakan tanpa adanya paksaan sehingga kebijakan dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya.

d. Struktur Birokrasi

Ada dua karakteristik yang mendongkrak implementasi kebijakan berjalan dengan baik, pertama, SOP (*Standard Operational Procedures*) yaitu standar yang ditetapkan dan dilakukan oleh implementor kebijakan. Dengan adanya SOP prosedur pelaksanaan dapat terkontrol dan berjalan sesuai dengan program yang akan dijalankan sehingga lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab berdasarkan SOP tersebut. Kedua, Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dijalankan tanpa tumpang tindih dengan tetap mempunyai tugas masing-masing secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Keseluruhan variabel saling berkaitan sehingga mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan publik.¹⁵ Evaluasi kebijakan merupakan upaya untuk melihat dan menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal dalam pelaksanaannya. Evaluasi kebijakan publik dimaksud untuk melihat dan mengukur efektivitas dalam suatu kebijakan. Dalam melihat efektivitas kebijakan dilihat dari dua fenomena, yaitu:

a. Respon dari lingkungan kebijakan/kelompok sasaran

¹⁴ Ibid, hal :22

¹⁵ Ibid, hal: 24

Implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil dengan melihat respon dari masyarakat, tentu dalam implementasi kebijakan dapat berjalan dengan beberapa faktor yaitu: Komunikasi, struktur birokrasi, ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan antar pelaksana. Setelah melakukan implementasi kebijakan dengan benar maka kita akan melihat respon masyarakat dalam penerimaan kebijakan yang dimaksud.

b. Yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap kebijakan

Ketika masyarakat merespon mengenai kebijakan, pemerintah berupaya untuk mewujudkan kebijakan dalam melihat apakah masyarakat menerima respon kebijakan tersebut atau tidak dan hal apa saja yang mempengaruhi respon tersebut, baik dari segi negatif maupun positif, dalam penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

2.1.2. Teori Penanaman (Caltivation Theory) Kebijakan

Penanaman adalah proses, perbuatan atau cara menanamkan atau menanam. ¹⁶ Penanaman yang dimaksud merupakan suatu cara atau proses untuk menanamkan suatu perbuatan atau tindakan sehingga apa yang ditanam akan tumbuh. Dalam hal ini pemerintah berusaha dalam penanaman kebijakan kepada masyarakat, dalam implementasi kebijakan pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat dan menanam kebijakan yang akan dijalankan. Sehingga implementasi kebijakan berjalan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

¹⁶ WJS. Purwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal: 895.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanaman kebijakan kepada masyarakat:

1. Contoh bagi masyarakat, dalam hal ini pemerintah meyakinkan masyarakat dengan sikap, memberikan contoh dalam mengimplemenasi kebijakan, sehingga masyarakat meniru apa yang dilakukan pemerintah dan yakin akan kebijakan tersebut.
2. Tanggung Jawab, sikap dan perilaku pemerintah dan implementor dalam melaksanakan kegiatan atau dalam implementasi kebijakan.
3. Komunikatif, melalui komunikasi yang baik diharapkan menimbulkan kerjasama dan saling terbuka antara pemerintah atau implementor kebijakan dengan masyarakat.
4. Sumber daya, dalam penanaman kebijakan kepada masyarakat juga harus mempunyai SDM yang handal. Dan dana yang mencukupi pemenuhan imlementasi kebijakan
5. Cara yang digunakan, pemerintah melakukan berbagai cara dalam pengimplementasi kebijakan baik dari segi negative maupun positif untuk mencapai tujuan.

2.2. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa referensi sebagai bahan pertimbangan sekaligus memperkaya data dan informasi dari penelitian tersebut, penelitian tersebut sudah pernah dilakukan oleh:

Jurnal keperawatan yang ditulis oleh Nining Puji Astuti, DKK. Berjudul persepsi masyarakat terhadap penerimaan vaksinasi Covid-19: literatur review. No. 13. Volume (3). Tahun 2021. Dalam jurnal ini mereka menganalisis mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksin dengan menggunakan literatur review, masyarakat ragu dengan vaksin karena kurangnya informasi yang memadai. Yang membedakan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai implementasi kebijakan terhadap vaksinasi Covid-19 dengan melihat bagaimana pemerintah Aceh Besar dalam mengimplementasikan vaksin tersebut kepada masyarakat dengan cara apa pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar.

Jurnal ilmiah yang berjudul implementasi strategi komunikasi kesehatan dalam meyakinkan masyarakat untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Barito Kuala yang ditulis oleh Sukmana, Rika Apriani. DKK. No. 1. Volume (5). Tahun 2021. Dalam jurnal ini membahas mengenai komunikasi kesehatan dalam meyakinkan masyarakat dalam vaksinasi. Pemerintah berperan penting dalam penyampaian informasi. Dan bagaimana informasi sampai ke masyarakat sehingga tidak muncul hoaks-hoax yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat. Artikel jurnal di atas ditulis oleh tenaga kesehatan. Berbeda dari penelitian yang akan saya lakukan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar apakah sudah berjalan dan bagaimana cara pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut serta melihat respon masyarakat dari

implementasi kebijakan dan apa saja yang mempengaruhi respon masyarakat mengenai kebijakan implementasi vaksinasi Covid-19 di kabupaten Aceh Besar.

Jurnal Syntax Admiration yang berjudul implementasi kebijakan di Kota Boyolali yang ditulis oleh Niken, Niken. DKK. Tahun 2021. No.2(11). Artikel ini membahas mengenai bagaimana jalannya vaksinasi covid-19 dan hasilnya vaksinasi Covid-19 di Kota Boyolali sudah berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakan sesuai aturan pemerintah yang telah ditetapkan sehingga implementasi kebijakan vaksin covid 19 di Boyolali berjalan dengan lancar. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar apakah sudah berjalan dan bagaimana cara pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut serta melihat respon masyarakat dari implementasi kebijakan dan apa saja yang mempengaruhi respon masyarakat mengenai kebijakan implementasi vaksinasi Covid-19 di kabupaten Aceh Besar.

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, yang berjudul implementasi kebijakan Covid-19 di Kota Banda Aceh, yang ditulis oleh Almanzani, Nada Nafira. Tahun 2022. Vol, 7. No, 5. Dalam jurnal ini membahas implementasi kebijakan vaksinasi ditinjau dari teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Hambatan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Banda Aceh karena, rendahnya partisipasi masyarakat, keterpaparan terhadap hoax, keterbatasan petugas vaksinasi Covid-19, insentif petugas vaksinasi Covid-19, Dosis Vaksinasi Covid-19 yang rusak, keraguan terhadap vaksin Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan

permasalahan secara rinci. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar apakah sudah berjalan dan bagaimana cara pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut serta melihat respon masyarakat dari implementasi kebijakan dan apa saja yang mempengaruhi respon masyarakat mengenai kebijakan implementasi vaksinasi Covid-19 di kabupaten Aceh Besar.

Jurnal administrasi publik Universitas Medan Area, yang berjudul studi kasus penolakan publik atas kebijakan public, yang ditulis oleh Dewi, Rosmala. Tahun 2017. Vol. 1. No, 5. Dalam jurnal ini membahas penolakan publik terhadap pemerintah, dari segi bagaimana kebijakan terbentuk, apakah merugikan rakyat sehingga dicarikan solusi yang tepat untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. kasus penolakan publik yang pernah terjadi antara lain peristiwa MALARI (malapetaka lima belas januari) yaitu sebuah aksi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial tanggal 15 januari 1974. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar apakah sudah berjalan dan bagaimana cara pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga diterima dengan baik oleh masyarakat serta melihat respon masyarakat dari implementasi kebijakan dan apa saja yang mempengaruhi respon masyarakat mengenai kebijakan implementasi vaksinasi Covid-19 di kabupaten Aceh Besar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metodologi adalah cara atau ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan cara tertentu untuk menemukan kebenaran, sedangkan penelitian adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapat ilmu pengetahuan atau sesuatu yang baru. Jadi metode penelitian adalah cara ilmiah dalam upaya menemukan data dan informasi yang ingin diteliti.

Tujuan Metodologi penelitian untuk memperoleh informasi serta mencapai tujuan dari permasalahan. Dengan menggunakan penelitian yang benar maka akan memperoleh informasi serta dapat dengan mudah melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Pendekatan masalah merupakan sebuah cara yang digunakan untuk melihat dan mempelajari suatu masalah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Oleh karena itu jenis pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk

memahami situasi dalam keunikan mereka sebagai bagian dari konteks tertentu dari interaksi disana.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif, dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang dilakukan dengan subjek yang terlibat dan menghasilkan analisis yang lebih deskriptif daripada prediktif dengan tujuan untuk lebih memahami secara mendalam sudut pandang subjek penelitian.¹⁷

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang implementasi kebijakan vaksin di Aceh Besar, dalam hal ini melihat bagaimana pemerintah dalam implementasi kebijakan vaksin Covid-19 di Aceh Besar karena sedikitnya masyarakat yang melakukan vaksinasi yaitu sekitar 18.05 persen dari 70 persen yang direncanakan pada oktober 2021.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan mengenai fakta yang dapat dikaji secara mendalam.¹⁸ Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Guna melihat bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam vaksinasi covid-19 di Kabupaten Aceh Besar. Aceh Besar dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh dengan

¹⁷ Aminah. S. roikon 2019. *Pengantar metode penelitian kualitatif ilmu politik*. Jakarta: Prenada Media Grup.

¹⁸ Yuswandi, Hery. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2003)h.101.

vaksinasi covid-19 yang tergolong rendah yaitu sekitar 18.05 persen dari 70 persen yang direncanakan pada oktober 2021.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif tertarik untuk memahami makna yang telah dibangun oleh orang dengan bentuk penyelidikan yang membantu dalam menjelaskan fenomena sosial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumbernya langsung dengan melakukan wawancara pada subjek yang terlibat dalam hal yang ingin diteliti. Dan dikumpulkan oleh peneliti sendiri.¹⁹ Data sekunder adalah data yang didapatkan bukan dari sumbernya langsung, melainkan dari data yang sudah didapatkan oleh orang lain, buku, jurnal, dokumen dan dari tempat lainnya.

3.5. Informan Penelitian

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian kualitatif dibutuhkan informan yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Sekretariat Kesbangpol Aceh Besar, Dinas Kesehatan Aceh Besar, puskesmas, POLRES Aceh Besar, Camat, Keuchik (Kepala Desa). Dan untuk masyarakat saya akan mewawancarai 9 orang masyarakat yaitu 1 laki-laki dari kalangan petani, 1 perempuan dari kalangan pengusaha, 1 anak perempuan sebagai pelajar yang berusia 15 tahun, 1 anak perempuan yang berusia 16 tahun, 1 lansia yang berumur 65 tahun,

¹⁹ Cooper, R Donald, C. William Emory. Metode penelitian Bisnis, Alih Bahasa Gunawan, Iman Nurmawan, (Jakarta:Erlangga,1999)h. 256

1 sarjana, 1 mahasiswa, 1 orang pria dari kalangan pengusaha.1 orang ibu rumah tangga.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

Informan	Jumlah informan
Sekretaris Kesbangpol Aceh Besar	1
P2P dan Imunisasi dinas kesehatan dan Sekretaris satgas Covid-19 Aceh Besar	1
Camat	2
Keuchik	2
Kapolres	1
Ketua Imunisasi dan satgas Covid-19 Puskesmas	1
Petani	1
Ibu Rumah Tangga	1
Pengusaha batu bata	1
Pengusaha panglong kayu	1
Sarjana/Mahasiswa	2
Siswi	2
Lansia	1

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian agar penelitian berjalan baik dan mendapatkan hasil yang akurat, beberapa teknik pengumpulan data dari penelitian ini

3.6.1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan subjek atau narasumber atau orang yang diwawancara, yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan.²⁰ Wawancara mengacu pada percakapan satu lawan satu, antara seseorang yang bertanya atau wawancara, dan seseorang yang menjawab atau narasumber. Dalam wawancara saya memilih 11 orang yang mewakili unsur pemerintah sebagai implementor kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan.

3.6.2. Observasi

Setelah melakukan wawancara mendalam, peneliti melakukan observasi/pengamatan sebagai sesuatu yang penting dalam sebuah penelitian. Observasi dilakukan dengan pengamatan perilaku objek yang akan diteliti atau

²⁰ Suwartono, Dasar-dasar metodologi penelitian, (Yogyakarta: ANDI, 2014). Hal: 154.

informan penelitian. Observasi adalah alat untuk mengumpulkan data dan dilakukan secara sistematis.²¹

3.6.3. Dokumen

Dokumen adalah data yang sudah di teliti oleh peneliti sebelumnya, data yang di dapat dari tempat yang melakukan atau tempat yang akan kita teliti, buku, jurnal, koran dan tempat tempat lain yang mempunyai data mengenai apa yang akan kita teliti.²²

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan apakah benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang sudah diperoleh itu sudah valid maka perlu digunakan dalam teknik triangulasi sumber data dalam proses pemeriksaan data pada penelitian ini.

²¹ Tukiran, tuniredja dan Hidayati Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif (sebuah pengantar)*, (Bandung:Alfabeta,2014). Hal: 48.

²² Ibid, hal: 51

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Profil Kabupaten Aceh Besar

Aceh Besar adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonom melalui UU No. 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang, sehingga ibu kota Kabupaten Aceh Besar dipindahkan ke Jantho.

4.1.1. Jumlah Penduduk Dan Kondisi Ekonomi

Kabupaten Aceh Besar secara administratif terdiri dari 23 kecamatan dengan 599 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah kabupaten Aceh Besar adalah sebesar 2.974,12 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 425.216 jiwa, atau merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak kelima di Provinsi Aceh.²³ Pada tahun 2019, jumlah penduduk laki-lakinya mencapai 218.135 jiwa sementara jumlah penduduk perempuan mencapai 207.081 jiwa.

²³ Badan pusat statistic kabupaten Aceh Besar (susenas 2019-2020).

Tabel 4.1.**Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Aceh Besar Tahun 2020.**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Lhoong	5,941	5,040	10,981
Lhoknga	9,285	8,646	17,931
Leupung	1,633	1,462	3,095
Indrapuri	12,107	11,957	24,064
Kuta Cot Glie	7,553	7,378	14,931
Seulimeum	13,367	12,742	26,110
Kota Jantho	5,397	4,819	10,216
Leumbah seulawah	6,871	6,119	12,990
Mesjid Raya	12,847	12,380	27,417
Darussalam	13,759	13,658	20,024
Baitussalam	10,886	9,138	28,419
Kuta Baro	14,198	14,221	21,405
Montasik	10,904	10,501	13,071
Blang Bintang	6,711	6,360	33,921
Ingin Jaya	17,198	16,723	17,091
Krueng Barona Jaya	8,762	8,329	16,754
Suka Makmur	8,443	8,311	16,754
Kuta Malaka	3619	3,504	7,123

Simpang Tiga	3,275	3,144	6,419
Darul Imarah	28,704	27,695	56,400
Darul Kamal	4,195	3,985	8,180
Peukan Bada	10,011	8,860	18,871
Pulo Aceh	2,469	2,107	4,576
Jumlah	218,135	207,081	425,216

Penduduk Kabupaten Aceh Besar mayoritas bekerja sebagai buruh/karyawan dengan jumlah 74.510 atau setara dengan 43%, berusaha sendiri berjumlah 46.312 jiwa setara dengan 27%, kemudian sebagai pekerja bebas sebanyak 18.226 jiwa atau setara 11%, selanjutnya pekerja keluarga/tak dibayar berjumlah 14.586 jiwa atau setara dengan 8 %, selanjutnya buruh tetap berjumlah 10.771 jiwa atau sebanyak 6%, dan buruh tak tetap berjumlah 8.925 jiwa atau setara dengan 5% penduduk.²⁴

Tabel 4.2
Status Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Aceh Besar

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Buruh/Karyawan	74.510	43%
Berusaha Sendiri	46.312	27%

²⁴ Badan pusat statistic kabupaten aceh Besar (susenas 2019-2020).

pekerja bebas	18.227	11%
pekerja keluarga/tak dibayar	14.586	8%
buruh tetap	10.771	6%
buruh tak tetap	8.925	5%

Tingkat angkatan kerja di Aceh Besar tahun 2020 dengan tingkat angkatan kerja mencapai 167.283 jiwa. Adapun yang bekerja berjumlah 173.332 jiwa, dan pengangguran terbuka mencapai 14.291 jiwa.²⁵

Tabel 4.3.
Jumlah Tingkat Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020

Uraian	Jumlah jiwa (2020)
Angkatan kerja	167.283 jiwa
Bekerja	173.332 jiwa
Pengangguran terbuka	14.291 jiwa

Dari tingkat angkatan kerja dapat kita lihat jumlah pengangguran di kabupaten Aceh Besar tahun 2020 yang bukan angkatan kerja mencapai 124.976 jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7.62 %.

²⁵ <https://acehbesarkab.bps.go.id>. Pada tanggal 13 september 2022, pada pukul 12.00 wib

Tabel 4.4
Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020

Jenis	Jumlah
Bukan Angkatan Kerja	124.978
TPT%	7.62%

4.1.2. Agama

Aceh Besar adalah kabupaten dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dengan jumlah penduduk sebanyak 425.216 jiwa, 394.352 adalah pemeluk agama Islam, 912 Kristen, 189 Katoli, 14 Hindu dan 186 Budha.

Tabel 4.5.
Jumlah Pemeluk Agama Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019-2020

Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
394.352	912	189	14	186

4.1.3. Pendidikan Dan Kesehatan

Tingkat pendidikan di Aceh Besar mencapai rata-rata 78.06 persen. Dengan 99.83 persen di tingkat Sekolah Dasar, 97.10 persen di tingkat Sekolah Menengah Pertama, 79,50 persen tingkat Sekolah Menengah Atas, dan 35,84 persen di tingkat Universitas.²⁶

²⁶ *Ibid.*

Tabel 4.6.

Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019

SD	SMP	SMA	UNIVERSITAS	Rata-Rata Tingkat Pendidikan
99,18	97,10	79,50	35,84	78,6

Sarana kesehatan di kabupaten Aceh Besar terdiri dari 28 puskesmas, 68 pustu dan 657 posyandu pada tahun 2019. Indikator kesehatan di kabupaten Aceh Besar angka kesakitan pada tahun 2019 mencapai 59,42, rata rata lama sakit 6,34.

Tabel 4.7.

Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019

Puskesmas	PUSTU	Posyandu
28	64	657

Jumlah tenaga kesehatan di kabupaten Aceh Besar menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2019 jumlah dokter mencapai 138 dengan dokter spesialis 13, dokter umum 107 dan dokter gigi 18 orang, perawat dan bidan berjumlah 1.185, tenaga farmasi berjumlah 45 dan kesling 65 dan ahli gizi berjumlah 72 orang.

4.2. Capaian vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar

Di Provinsi Aceh, total vaksinasi dosis 1 di Aceh mencapai 28,07 persen atau diikuti oleh 1,13 juta peserta vaksin, sedangkan untuk vaksinasi dosis 2, tercatat sudah 14,37 persen atau sebanyak 578,8 ribu peserta vaksin menurut data pada

tanggal 17 Oktober 2021. Pemerintah Aceh sendiri menargetkan vaksinasi Covid 19 di Provinsi Aceh bisa mencapai 4 juta jiwa atau setara dengan 80 persen dari penduduk Aceh. Namun sayangnya, sebagian wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih mencatat tingkat vaksinasi yang cukup rendah dari wilayah kabupaten di provinsi lain di Indonesia. Capaian vaksinasi Covid-19 di Provinsi Aceh masih sangat minim, dan ini berdampak pada skor pengendalian Covid-19.²⁷

Hal ini menyebabkan pemerintah Aceh berupaya untuk meningkatkan vaksinasi di seluruh kabupaten dan kota. Salah satu kabupaten yang tercatat memiliki tingkat vaksinasi Covid-19 yang rendah adalah Kabupaten Aceh Besar. Tercatat bahwa tingkat vaksinasinya baru mencapai 18.05 persen per oktober 2021. Padahal program vaksinasi di kabupaten ini direncanakan menyasar sebanyak 307.32 ribu atau setara dengan 70 persen peserta. Namun hingga Oktober 2021, tercatat jumlah peserta yang telah melakukan vaksinasi Covid-19 hanya sebanyak 450 peserta yang menyebabkan jumlah stok vaksin tersisa cukup banyak, yaitu sebesar 22.537 dosis vaksin.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mengikuti peraturan dari Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). PERPRES Nomor 14 tahun 2021 menjadi landasan dan aturan dalam pelaksanaan vaksinasi di daerah, selanjutnya di kabupaten termasuk Kabupaten Aceh Besar

²⁷ cnnindonesia.com, Aceh dan NTT jadi wilayah vaksinasi covid-19 terendah, Diakses melalui situs: [https://www.cnnindonesia.com/acehdannttjadiwilayahvaksinasicovid19 terendah](https://www.cnnindonesia.com/acehdannttjadiwilayahvaksinasicovid19%20terendah) pada tanggal 29 september 2021, pukul: 10.00 wib

Dalam Permenkes No. 10 bab VII pasal 41(3) tahun 2021 menyatakan bahwa pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan vaksinasi Covid 19. Dalam peningkatan vaksinasi Covid-19 merujuk dalam Permenkes ini Pemerintah Aceh Besar harus mengajak pemuka agama, tokoh adat dan seluruh masyarakat untuk membantu dalam Vaksinasi Covid-19 dan membantah semua keyakinan negatif mengenai Vaksin Covid-19 yang telah beredar di masyarakat, sehingga implementasi vaksin yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Besar dapat dilakukan secara merata pada masyarakat kabupaten Aceh Besar.

4.3. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Aceh Besar

Pemerintah kabupaten Aceh Besar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan vaksinasi. Dalam rangka melihat bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar, penulis merujuk kepada model yang dikembangkan oleh George Edward III di mana ia mengemukakan bahwa terdapat 4 faktor krisis yang dapat ditelusuri untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

4.3.1. Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi adalah salah satu alat dalam penyampaian kebijakan, dengan memberikan informasi yang tepat kepada pelaksana kebijakan atau kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat. Setidaknya ada tiga faktor yang

mempengaruhi informasi yaitu: 1) penyaluran komunikasi yang baik, 2) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti, 3) informasi implementasi kebijakan haruslah jelas dan sesuai pelaksanaan awal, konsisten terhadap pelaksanaan kebijakan yang akan dijalankan.

Komunikasi adalah salah satu variabel untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang diinginkan. Sasaran kebijakan harus diberikan informasi mengenai kebijakan yang akan ditetapkan. Masyarakat harus mendapat informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerimaan informasi. Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, pemerintah bekerja sama dengan semua unsur yang terlibat sebagai implementor kebijakan sehingga penyampaian informasi selaras dengan kebijakan yang ditetapkan.

Permenkes no. 10 Tahun 2021 dalam pasal 41 Bab 8 ayat 1 mengenai strategi komunikasi vaksinasi untuk menumbuhkan penerimaan masyarakat terhadap vaksin dengan strategi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang vaksinasi Covid-19, merekomendasikan agar masyarakat dibekali dengan informasi yang tepat, didorong untuk meningkatkan partisipasi dalam vaksinasi, serta meningkatkan kesediaan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 dan ini harus melibatkan semua pihak, baik dari pemerintahan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tenaga kesehatan.

Pemerintah dan implementor kebijakan berusaha meyakinkan masyarakat dengan berbagai cara, salah satunya komunikasi, komunikasi yang dipakai harus meyakinkan masyarakat dan membuat masyarakat tertarik untuk di vaksinasi.

Informasi mengenai pentingnya vaksinasi Covid-19 juga selalu diberikan kepada masyarakat Aceh Besar dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang disampaikan oleh Bapak Mawardi selaku Sekretariat Kesbangpol Aceh Besar:

Sosialisasi dilakukan setiap hari kepada masyarakat dengan berbagai media, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan spanduk, Koran, radio dan berbagai media sosial lainnya, kami dari pemerintah kabupaten selalu menyampaikan kepada masyarakat bahaya covid-19 dan pentingnya vaksinasi Covid-19.²⁸

Komunikasi secara langsung seperti mendatangi ke rumah-rumah, pengumuman di meunasah-meunasah, yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan komunikasi tidak langsung kepada masyarakat seperti penyebaran informasi melalui spanduk, media sosial dan sebagainya. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Abdullah, selaku Camat Kecamatan Darussalam, Aceh Besar:

Informasi diberikan kepada masyarakat melalui berbagai media, dan secara langsung. Dengan melibatkan keuchik serta perangkat desa, pengumuman di masjid dan meunasah-meunasah, mendatangi langsung ke rumah-rumah warga serta selalu mengingatkan warga saat datang ke kantor camat untuk vaksin dan memberikan arahan serta memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat.²⁹

Hal ini juga di sampaikan oleh bapak Yuslizar selaku Camat Kecamatan Kuta Baro:

²⁸ Wawancara dengan bapak Mawardi, S.E, sekretariat KESBANGPOL Kabupaten Aceh Besar. Pada tanggal 5 juli 2022

²⁹ Wawancara dengan bapak Abdullah, camat kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Pada tanggal 19 juli 2022

Sosialisasi juga dilakukan oleh semua pihak di kecamatan, agar masyarakat mau melakukan vaksinasi dan sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara agar masyarakat tau pentingnya vaksinasi covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mendatangi rumah warga, dari spanduk dan sebagainya.³⁰

Meskipun demikian, di awal pelaksanaan komunikasi ternyata tidak berjalan seperti yang direncanakan. Hal ini tidak terlepas dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar yang tergolong cukup luas dengan jumlah penduduk mencapai 4 ratus ribu jiwa. Pada awalnya, penyebaran informasi agak sedikit sulit diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih awal mendapat berbagai informasi hoaks mengenai vaksin Covid-19 seperti simpang siur mengenai kehalal-haraman vaksin; vaksinasi covid-19 yang diduga dapat menyebabkan kematian, dan sebagainya. Hal ini dipaparkan oleh ibu Intan ketua P2P dan Imunisasi Dinas Kesehatan serta Sekretariat Satgas Covid-19 Aceh Besar:

Wilayah Aceh Besar yang tergolong luas yaitu sebesar 2.974,12 km² terdiri dari 23 kecamatan dengan 599 desa dan dengan jumlah penduduk sebanyak 425.216 jiwa, juga menjadi kenapa di awal vaksinasi covid-19 rendah, isu hoaks mengenai vaksin covid-19 lebih cepat menyebar dan informasi mengenai pentingnya vaksin, kehalal-haraman vaksin informasi ini agak lambat, dan kenapa di awal vaksin di aceh besar rendah. Dari banyaknya hambatan, pemerintah juga melakukan upaya untuk menekan hambatan ini, misalnya hambatannya penolakan ya kita lakukan sosialisasi lagi lebih berupaya menginformasikan lagi kepada masyarakat.³¹

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kondisi Kabupaten Aceh Besar yang tergolong luas membuat informasi mengenai vaksinasi sedikit terhambat

³⁰ Wawancara dengan Bapak Yuslizar, Camat Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, pada Tanggal 7 Desember 2022

³¹ Wawancara dengan ibu keumala Intan, ketua P2P Dinas Kesehatan dan sekretaris satgas Covid Aceh Besar. Pada tanggal 17 juli 2022

dan lambat sampai ke seluruh pelosok Aceh Besar. Hal ini dikarenakan hoaks-hoaks beredar lebih awal dan diserap oleh masyarakat, sehingga tingkat vaksinasi di kabupaten aceh besar di awal pelaksanaannya tergolong salah satu kabupaten dengan capaian vaksinasi terendah dari kabupaten yang lain di Provinsi Aceh. Menanggapi hal tersebut, pemerintah, tenaga kesehatan dan satuan dari Polres menggunakan komunikasi politik dengan berusaha memberikan informasi mengenai vaksinasi dengan berbagai cara serta media agar masyarakat paham dan memiliki kesadaran untuk ikut melakukan vaksinasi. Upaya tersebut terlihat cukup efektif mendorong tingkat vaksinasi Covid-19 di kabupaten Aceh Besar di mana pada tanggal 13 september 2022 mencapai 100.4% dosis 1, 72.9% dosis 2, 37,1 % untuk dosis 3, dan dosis 4 baru dimulai pada akhir Juli 2022.³²

Tabel 5.1.
Perbandingan Persentase vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar

	Vaksinasi Covid-19	Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3
Per Oktober 2021	Capaian (%)	18.05 %	7%	-
Per September 2022	Capaian (%)	100.4 %	72.9 %	37.1%

³² Dari covid-19. Acehprov.go.id diakses melalui <http://covid-19.acehprov.go.id/halaman/vaksinasi-masyarakat-umum-rentan>. Pada tanggal 13 september 2022, pada pukul 12.00 wib.

4.3.2. Sumber Daya

Menurut Edward III, sumber daya juga menjadi salah satu hal penting untuk menyukseskan implementasi kebijakan. Dalam hal sumber daya ada beberapa kriteria yang harus dimiliki yaitu, 1) sumber daya manusia yang akan menjalankan kebijakan haruslah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan kebijakan yang akan dijalankan. 2) wewenang yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan yang telah diamanatkan. 3) sarana dan prasarana yang tersedia dalam menjalankan kebijakan yang digunakan untuk mendukung secara langsung agar kebijakan dapat terlaksana dengan semestinya.

PERPRES no. 33 tahun 2022 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 menyebutkan bahwa sarana dan prasarana seperti vaksin dan alat suntik ditanggung dalam APBN, jadi setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19, tanpa terkecuali.

SDM yang mumpuni akan membuat implementasi berjalan dengan lancar dan jumlah personil yang dikerahkan haruslah memadai. Hal ini disampaikan oleh Ibu Intan ketua P2P dan Imunisasi Dinas Kesehatan Serta Sekretariat Satgas Covid-19 Aceh Besar:

Di setiap puskesmas itu ada tim vaksinator yang terdiri dari dokter, dokter Skrining, petugas imunisasi, yang berjumlah 8-10 yang sudah dilatih secara daring dan sudah memiliki sertifikat dan memiliki izin bekerja. Implementor yang melakukan vaksinasi harus punya sertifikat sebagai vaksinator. Aceh Besar mempunyai 33 sentra vaksinasi dari 28 puskesmas tambah 1 rumah sakit 1 klinik polres, dan TNI angkatan Darat di bawah pemerintah Aceh besar. Selain petugas, dukungan

dari LSM, dari ulama, dari tokoh masyarakat sangat mendukung dalam upaya vaksinasi.³³

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Sri Agustini selaku Penanggung Jawab Imunisasi dan Vaksinasi Covid-19 Puskesmas Darussalam:

Secara umum seluruh petugas puskesmas ikut terlibat dalam implementasi vaksinasi ini, tetapi secara khusus petugas yang terlibat adalah tim vaksinasi, dari dokter, UGD, dan petugas imunisasi dan bidan desa yang memiliki kemampuan dalam penyuntikan dan penanganan vaksin. Tim vaksinasi khusus ini yang diturunkan ke lapangan atau ke gampong-gampong kawasan puskesmas tersebut berada.³⁴

Polres juga melibatkan seluruh personil dalam implementasi kebijakan vaksinasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Charlie Kapolres Aceh Besar:

Dari polsek dan Polres Aceh Besar seluruh personil dikerahkan dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19 dengan turun langsung dalam menyampaikan informasi dan pengadaan tempat terhadap vaksinasi Covid-19 di Wilayah Aceh Besar.³⁵

Sarana dan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi ditanggung oleh negara dengan dana APBN dan di setiap gampong ada dana APBG yang dikhususkan untuk dana Covid-19. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alamsyah Keuchik Gampong Lieue Kecamatan Darussalam Aceh Besar:

Gampong menyediakan tempat vaksin, tetapi vaksin dan alat suntik disediakan oleh pemerintah dan dinas kesehatan. Di gampong juga

³³ Wawancara dengan ibu keumala Intan, ketua P2P Dinas Kesehatan dan sekretaris Satgas Covid Aceh Besar. Pada tanggal 17 Juli 2022

³⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Agustini, Penanggung Jawab Imunisasi dan Vaksinasi Covid Puskesmas Darussalam, pada tanggal 15 Juli 2022

³⁵ Wawancara dengan Bapak AKBP Charlie Saputra Bustamam, Kapolres Aceh Besar, pada tanggal 31 Juli 2022

*ada uang gampong yang khusus untuk merealisasikan vaksinasi, tetapi uang ini berbeda dengan uang gampong, uang ini memang sudah ditetapkan dan diberikan oleh pemerintah khusus untuk realisasi vaksinasi Covid-19.*³⁶

Dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19, implementor dikerahkan dari berbagai sektor pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan Covid-19, baik dalam tingkat daerah, kecamatan, gampong, dan seluruh petugas kesehatan, baik dinas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit, serta klinik-klinik di daerah kabupaten Aceh Besar dan TNI/POLRI yang berkompeten dan terlatih sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas vaksinator juga berasal dari dana desa yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19.

Namun demikian, salah satu hambatan yang dialami oleh petugas vaksinator adalah dalam penginputan data vaksinasi, jaringan yang terkendala karena kawasan di gampong atau pemadaman listrik yang berdampak pada jaringan internet. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sri Agustini Penanggung Jawab Imunisasi dan Vaksinator Covid-19 Puskesmas Darussalam:

Untuk biayanya saya rasa cukup, kalau untuk vaksin dan alat suntikan disuplai dari Dinas Kesehatan Aceh Besar, kalau untuk pelaksanaan ada dana dari desa yang berkisar 8% untuk dana vaksin. Salah satu hambatan yang kami alami adalah terkendala jaringan, ketika masyarakat melakukan vaksin, kami harus menginput data masyarakat tersebut untuk didaftarkan di Peduli Lindungi (aplikasi) bahwa yang bersangkutan telah divaksin, dan untuk mendapatkan sertifikat sudah divaksin, sehingga penginputan data tersebut harus

³⁶ Wawancara dengan bapak Alamsyah, keuchik Gampong lieue kecamatan Darussalam, kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 19 juli 2022

*tertunda, besoknya ada vaksinasi lagi, jadi datanya sudah bertumpuk dan membuat petugas jadi pusing.*³⁷

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah melibatkan seluruh tenaga kesehatan dan anggota Polres ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan vaksin covid-19, dan melibatkan seluruh kalangan masyarakat dari LSM, dari ulama, dari tokoh masyarakat dengan biaya yang mencukupi yang berasal dari APBN dan APBD yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19. Tetapi masih ada hambatan seperti kesulitan dalam penginputan data secara online dikarenakan masih terdapat banyak wilayah di Aceh Besar yang belum dapat mengakses internet. Hal ini menyebabkan proses penginputan data terpaksa harus tertunda.

4.3.3. Disposisi

Menurut George Edward III, disposisi adalah karakteristik para implementor kebijakan. Karakter yang harus dimiliki oleh implementor adalah tanggung jawab, kejujuran, komitmen, serta sikap profesional. Sikap tanggung jawab, kejujuran, komitmen, dan profesional yang dimiliki oleh implementor diharapkan mendapatkan dan meningkatkan kepercayaan dari masa masyarakat dan menurunkan resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut.

Sikap dan tanggung jawab merupakan salah satu hal penting dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19. Dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi ini, masyarakat memerlukan contoh dari pemerintah sendiri. Bila

³⁷Wawancara dengan ibu Sri Agustini, Penanggung jawab imunisasi dan vaksinator Covid puskesmas Darussalam, pada tanggal 15 juli 2022

pemerintah dan stakeholder serta tenaga kesehatan sudah melakukan vaksinasi diharapkan agar masyarakat juga tergerak untuk melakukan vaksin. Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan strategi pemberian sembako yang diharapkan dapat menjadi pendongkrak tingkat vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mawardi Sekretariat Kesbangpol Aceh Besar:

Stakeholder menjadi yang pertama untuk divaksin agar menjadi contoh untuk masyarakat sehingga masyarakat juga ikut divaksin. Di awal vaksinasi di Kabupaten Aceh Besar sangat berat ya, tetapi kami berupaya dalam mengajak masyarakat untuk vaksin.³⁸

Hal ini juga terjadi di tingkat desa, keuchik dan aparatur desa juga yang pertama divaksin sehingga menjadi contoh kepada masyarakat. Dengan demikian, timbul kesadaran diri dari masyarakat untuk divaksin seperti yang dikonfirmasi oleh Bapak Alamsyah Keuchik Gampong Lieue:

Kami tidak memaksa masyarakat untuk vaksin, karena semakin kita paksa masyarakat ini semakin tidak mau patuh, maka dari itu kami memberikan contoh. Dalam masyarakat gampong yang pertama divaksin adalah kami. Dengan ini ketika melihat kami, pak keuchik sudah divaksin, jadi masyarakat tidak takut lagi buat di vaksin.³⁹

Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Ulyani Keuchik Gampong Miruk Taman:

Di awal memenag masyarakat ragu apalagi ada isu-isu hoaks yang mengatakan vaksin haram dan sebagainya, tetapi kami sebagai keuchik dan aparatur gampong juga memberikan contoh dengan melakukan vaksinasi pertama sebelum masyarakat agar masyarakat

³⁸ Wawancara dengan bapak Mawardi, S.E, sekretariat KESBANGPOL Kabupaten Aceh Besar. Pada tanggal 5 juli 2022

³⁹ Wawancara dengan bapak Alamsyah, keuchik Gampong lieue kecamatan Darussalam, kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 19 juli 2022

*percaya akan efektifitas vaksin dan memebantah isu-isu hoaks yang beredar.*⁴⁰

Selain menjadikan pemerintah sebagai contoh untuk meyakinkan masyarakat dalam vaksinasi Covid-19, dan menghilangkan keraguan masyarakat. Pemerintah melakukan segala strategi politik untuk meningkatkan vaksinasi Covid-19 dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pembagian bantuan sosial. Hal ini disambut antusias oleh masyarakat. Apalagi mengingat di masa pandemic, masyarakat cenderung tidak bekerja sehingga menyebabkan ekonominya menurun. Pembagian sembako menjadi salah satu langkah yang diupayakan pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk vaksinasi Covid-19. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mawardi sekretariat Kesbangpol Aceh Besar:

*Di awal vaksinasi di kabupaten Aceh Besar sangat berat ya, tetapi kami berupaya dalam mengajak masyarakat untuk vaksin, salah satunya seperti pemberian sembako, dan hal lainnya, saya rasa cukup efektif.*⁴¹

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Abdullah, Camat kecamatan Darussalam:

Salah satu cara untuk meningkatkan vaksin, kami membuat masyarakat sadar, misal para penerima BLT. Kalau tidak punya sertifikat vaksin berarti penerimaannya dihentikan. Dari ini masyarakat mau melakukan vaksinasi covid-19. Vaksin sekarang kan gak cuman vaksin, kami bekerja sama dengan beberapa donatur dari pihak swasta atau adiknya pada pemberian sembako, dan sebagainya, kan sewaktu covid-19 kemarin kita juga tau bahan makanan pokok seperti minyak, gula, beras naik, dengan pembagian sembako saya lihat masyarakat sangat antusias datang untuk

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Ulyani, Keuchik Gampong Miruk Taman, Aceh Besar, pada tanggal 7 Desember 2022

⁴¹ Wawancara dengan bapak Mawardi, S.E, sekretariat KESBANGPOL Kabupaten Aceh Besar. Pada tanggal 5 juli 2022

*melakukan vaksinasi covid-19 walaupun sembakonya tidak seberapa.*⁴²

Vaksinator juga mendapat pelatihan khusus dan termasuk tenaga profesional yang mempunyai sertifikat, sehingga terjamin dan bisa melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Akan tetapi masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena memberikan sertifikat kepada masyarakat tanpa harus divaksin terlebih dahulu. Masyarakat hanya cukup menyerahkan KTP dan langsung mendapatkan sertifikat vaksin. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan bagaimana data mencatat bahwa tingkat vaksinasi di Aceh Besar meningkat drastis beberapa waktu belakangan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Intan ketua P2P dan Imunisasi Dinas Kesehatan Serta Sekretariat Satgas Covid-19 Aceh Besar:

*Tim vaksinator yang terdiri dari dokter, dokter Skrining, petugas imunisasi, yang berjumlah 8-10 yang sudah dilatih secara daring dan sudah memiliki sertifikat dan memiliki izin bekerja. Implementor yang melakukan vaksinasi harus punya sertifikat sebagai vaksinator. Sehingga mampu melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Tetapi masih ada karena adanya beberapa masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19, datanya diinput untuk mendapatkan sertifikat vaksin, karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan hal ini berdampak kepada masyarakat sendiri karena tidak adanya kekebalan tubuh, bukan tidak mungkin kita kembali seperti awal pandemi.*⁴³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemerintah telah mengambil sikap dengan cara memberikan contoh untuk masyarakat sehingga dengan harapan dapat menghilangkan keraguan masyarakat untuk ikut melakukan vaksinasi

⁴² Wawancara dengan bapak Abdullah, camat kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Pada tanggal 19 juli 2022

⁴³ Wawancara dengan Ibu keumala Intan, ketua P2P Dinas Kesehatan dan sekretaris satgas Covid Aceh Besar. Pada tanggal 17 juli 2022

Covid-19. Penyerahan bantuan sosial juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dan implementor kebijakan untuk mendorong dan menarik masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar. Terlepas dari contoh yang baik yang dilakukan pemerintah, namun tetap saja ada oknum pemerintah atau implementor kebijakan yang melakukan hal-hal yang ilegal, dan untuk mencapai tujuan bukan hanya dengan hal positif tetapi juga hal “negative” yang dilakukan oleh oknum pemerintah dan implementor kebijakan, seperti adanya masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi Covid-19 tetapi memiliki sertifikat vaksin. Hal ini bisa jadi disebabkan adanya tuntutan pemenuhan tingkat vaksinasi yang harus dikejar. Bagi masyarakat sendiri, hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan syarat administrasi yang ditetapkan untuk keperluan seperti masuk sekolah, penerimaan dana sosial, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa manfaat vaksin belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat Aceh Besar, namun meningkatnya tingkat vaksinasi bisa jadi lebih dikarenakan tingkat keperluan masyarakat yang tinggi akan sertifikat vaksin untuk memenuhi keperluan-keperluan administrasi yang dipersyaratkan. Dan belum ada upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pencegahan adanya sertifikat ilegal dan oknum-oknum yang terlibat dalam hal tersebut.

4.3.4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III ada dua karakteristik yang mendorong implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Pertama, SOP (*Standard Operational Procedures*)

yaitu standar yang ditetapkan dan dilakukan oleh implementor kebijakan. SOP adalah standar dalam keseragaman pelaksanaan implementasi yang kompleks. Dengan adanya SOP, prosedur pelaksanaan dapat terkontrol dan berjalan sesuai dengan program yang akan dijalankan sehingga lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab berdasarkan SOP tersebut. Kedua, fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh implementor dengan tetap mempunyai tugas masing-masing secara menyeluruh dalam implementasi suatu kebijakan.

Struktur birokrasi juga berperan penting dalam implementasi kebijakan, tatanan dan aturan yang digunakan haruslah jelas dan tertata, aturan yang dijalankan harus jelas. Implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 sendiri berasal dari peraturan pemerintah di level nasional seperti yang dijelaskan oleh Bapak Charlie Kapolres Aceh Besar:

Di tingkat kabupaten tidak ada aturan khusus, tetapi mengikuti aturan dari pusat, dan aturan dari provinsi. Aturan yang berasal dari instruksi presiden, permenkes, dan aturan yang berasal dari pusat.⁴⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Yuslizar Camat Kecamatan Darussalam:

Covid-19 adalah masalah internasional, bukan hanya Indonesia saja seluruh dunia mengalami krisis, aturannya sudah jelas ada dalam permenkes dan peraturan presiden, lalu ada sk dari gubernur dan dikeluarkan surat dari bupati dari kabupaten mengenai penanganan covid-19.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan bapak AKBP Charlie Saputra Bustamam, Kapolres Aceh Besar, pada tanggal 31 juli 2022

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Yuslizar, Camat Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, pada tanggal 7 desember 2022

Aturan dari pusat dan Kemenkes dijalankan oleh pemerintah daerah seperti yang disampaikan oleh ibu Intan ketua P2P dan Imunisasi Dinas Kesehatan Serta Sekretariat Satgas Covid-19 Aceh Besar:

*Aturan vaksin sendiri adalah aturan dari pusat, karena sehubungan dengan adanya Covid-19 yang melanda, maka dikeluarkan peraturan menangani vaksinasi Covid-19, sedangkan Aceh Besar sendiri mengikuti edaran dari gubernur, mengenai upaya vaksinasi Covid-19 untuk usia lansia, remaja, dan anak-anak diatas 12 tahun.*⁴⁶

Aturan vaksinasi untuk masyarakat khusus seperti ibu hamil dan anak-anak juga diatur dalam kebijakan yang dibuat oleh pusat dan Kemenkes. Untuk menjalankan sebuah kebijakan haruslah mempunyai SOP, agar berjalan sesuai aturan dan ketentuan awal seperti yang disampaikan oleh ibu Sri Agustini penanggung jawab imunisasi dan vaksinator Covid-19 Puskesmas Darussalam:

*Kebijakan mengenai vaksinasi kami mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes, baik itu mengenai jenis vaksin, dosis, spek yang dipakai, rantai dingin vaksin segala hal mengenai vaksinasi covid-19. Peraturan semua diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes, diantaranya, vaksinasi ibu hamil, vaksinasi untuk usia anak 6-11 tahun. Dalam pelaksanaan kebijakan apa saja pasti ada SOP nya, sebelum turun ke masyarakat kami buat SOP sesuai aturan dari kemenkes, setiap pekerjaan yang kami lakukan harus ada SOP, kalau tidak ada gak boleh melakukan karena tidak sesuai dengan aturan, sop ini menjelaskan mengenai persiapan dalam melakukan, cara penyuntikan, tujuannya, prosedur pelaksanaannya, dan bagaimana seharusnya vaksinasi dilakukan.*⁴⁷

⁴⁶ Wawancara dengan ibu keumala Intan, ketua P2P Dinas Kesehatan dan sekretaris satgas Covid Aceh Besar. Pada tanggal 17 juli 2022

⁴⁷ Wawancara dengan ibu Sri Agustini, Penanggung jawab imunisasi dan vaksinator Covid puskesmas Darussalam, pada tanggal 15 juli 2022

Dari wawancara yang saya lakukan dapat ditarik kesimpulan, Aturan dan kebijakan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19, adalah aturan yang tertuang dalam keputusan presiden dan permenkes yang dijalankan. Sementara itu, tidak ada aturan khusus dari daerah, tetapi mengikuti kebijakan dan aturan dari pusat di mana di dalam peraturan dijelaskan mengenai implementor yang terlibat dan aturan vaksinasi bagi masyarakat.

4.4. Respon Masyarakat Aceh Besar Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19

Dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19, pemerintah berupaya dalam meningkatkan vaksinasi di kabupaten Aceh Besar. Tetapi harus ada evaluasi untuk melihat dan mengukur efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Dalam melihat efektivitas kebijakan dilihat dari dua fenomena yaitu respon masyarakat dan faktor yang mempengaruhi respon tersebut. Respon masyarakat dalam vaksinasi Covid-19 terdiri dari masyarakat yang pro atau mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan ada pula masyarakat yang kontra terhadap kebijakan yang diterapkan dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Respon masyarakat yang pro dan kontra terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 karena berbagai alasan, seperti yang dijelaskan berikut:

4.4.1. Masyarakat Pro-Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi Covid-19 menjangkau seluruh masyarakat. Namun demikian, implementasi vaksinasi Covid-19 mendapatkan respon yang beragam dari

masyarakat. Terdapat respon yang pro terhadap kebijakan implementasi vaksinasi Covid-19, di mana masyarakat percaya bahwa dengan adanya vaksinasi Covid-19 dapat meningkatkan imunitas tubuh, sehingga tubuh membentuk kekebalan dan terhindar dari Covid-19. Seperti yang diutarakan oleh seorang sarjana keperawatan:

Saya sudah vaksin yang ke tiga, vaksin booster. Vaksin sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh terhadap Covid-19. Menurut saya tidak ada alasan masyarakat tidak mau vaksin. Saya tidak percaya informasi negatif mengenai vaksin, bisa kita lihat stakeholder, dan petugas kesehatan semua sudah melakukan vaksin, kalau misal ada hal yang tidak kita inginkan terjadi, pasti yang pertama yang divaksin adalah mereka stakeholder dan petugas kesehatan kan. Dengan melakukan vaksinasi Covid-19 juga membantu dalam keamanan nasional dan tingkat kesehatan di Indonesia terutama di Aceh Besar yang tingkat kematian akibat Covid-19 termasuk tinggi.⁴⁸

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di tengah-tengah masyarakat, terdapat kelompok masyarakat tertentu yang tidak mudah terbawa arus informasi yang hoaks. Di samping itu, selain vaksinasi dipercaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap Covid-19, ada pula kelompok masyarakat yang melakukan vaksin karena kebutuhan, seperti bepergian dan keperluan lainnya yang memerlukan sertifikat vaksinasi. Hal ini disampaikan oleh seorang pengusaha panglong kayu :

Saya sudah melakukan vaksinasi Covid-19, Dengan melakukan vaksin juga membantu meningkatkan imun tubuh dan keamanan nasional, dan untuk kesehatan juga, saya mau shalat berjamaah seperti sebelum pandemic, selain itu karena dalam melakukan pekerjaan saya sebagai pemilik panglong kayu melakukan hubungan dan bertemu dengan

⁴⁸ Wawancara dengan seorang sarjana keperawatan. Pada tanggal 9 agustus 2022

orang lain selain itu saya juga melakukan perjalanan saya butuh sertifikat vaksin.⁴⁹

Tanggapan positif terhadap vaksin Covid-19 juga di ungkapkan oleh seorang siswi menengah pertama:

Sudah vaksin, sudah 2 kali vaksinnya, vaksinnya dilakukan di sekolah, harus ada izin orang tua memang, dan ketika vaksinasi orang tua datang ke sekolah, di sekolah kami sertifikat vaksin jadi salah satu syarat untuk sekolah tatap muka, jadi orang tua saya mengizinkan, lagi pula sudah lama sekali kita Cuma belajar online, kalau takut ya orang tua saya takut, tapi kan udah diwajibkan vaksin.⁵⁰

Masyarakat juga melakukan vaksinasi karena menginginkan sertifikat vaksin untuk keperluan berobat, salah satu syarat dalam pengambilan BLT dan sebagainya, seperti yang disampaikan oleh seorang petani B:

Saya sudah vaksin, saya vaksin di meunasah gampong, di awal memang saya khawatir dan takut untuk di vaksin, tetapi informasi-informasi yang kita dapat dari pemerintah, keuchik, dari orang-orang kesehatan di puskesmas dan adanya berita yang mengatakan vaksin halal, akhirnya saya juga melakukan vaksinasi covid-19, selain itu juga karena saya dengar kalau tidak melakukan vaksin dan tidak mempunyai sertifikat vaksin tidak bisa lagi berobat, kalau gak bisa berobat gratis kan harus bayar mana sanggup bayar, makanya lebih baik melakukan vaksinasi dan mendapatkan sertifikat dan tidak bisa mendapat BTL lagi.⁵¹

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, masyarakat yang pro terhadap vaksin berasal dari kelompok masyarakat yang memang memandang manfaat vaksin Covid-19 bagi kekebalan tubuh dan kelompok masyarakat yang membutuhkan

⁴⁹ Wawancara dengan seorang pengusaha Panglong Kayu di kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 18 juli 2022

⁵⁰ Wawancara dengan seorang siswa sekolah tingkat pertama, pada tanggal 9 Desember 2022

⁵¹ Wawancara dengan seorang Ibu Rumah Tangga (55 thn), pada tanggal 9 desember 2022

sertifikat vaksin untuk keperluan tertentu. Mereka mempercayai kebermanfaatan vaksin dengan merujuk kepada para stakeholders yang sudah lebih dulu melakukan vaksinasi. Hal ini mendasari penerimaan mereka terhadap vaksin dikarenakan tidak melihat efek-efek negatif penggunaan vaksin pada para stakeholders yang sudah lebih dulu divaksinasi tersebut. Dengan demikian, informasi-informasi hoaks yang memapari mereka tidak cukup untuk memudahkan kepercayaan mereka terhadap pentingnya vaksinasi Covid-19. Di samping itu, ada pula kelompok yang pro terhadap vaksinasi ini karena memandang manfaatnya dalam aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan seperti dalam beribadah maupun dalam bekerja. Dan ada masyarakat yang melakukan vaksin karena menganggap perlunya sertifikat vaksin.

4.4.2. Masyarakat Kontra Vaksinasi Covid-19

Di samping masyarakat yang cukup mendukung kebijakan vaksinasi Covid-19, terdapat pula kelompok yang merespon kebijakan tersebut secara negatif atau menunjukkan penolakan. Adapun kelompok ini terbagi 2, yakni masyarakat yang memang menunjukkan secara terang-terangan penolakan mereka terhadap vaksinasi Covid-19, dan masyarakat yang menolak vaksinasi namun tidak menunjukkan penolakannya secara terang-terangan. Kelompok yang kedua ini menolak vaksinasi, tetapi menginginkan sertifikat vaksin didorong oleh kebutuhan-kebutuhan administrasi tertentu.

Ada masyarakat yang masih enggan untuk divaksin karena berbagai alasan, terutama karena berita-berita negatif mengenai vaksin yang beredar. Ketakutan

terhadap bahaya yang ditimbulkan terhadap vaksin juga membuat masyarakat masih takut untuk divaksin. Hal ini juga disampaikan oleh seorang lansia di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar:

Saya belum vaksin, karena sudah tua diharuskan vaksin Covid-19 kan, petugas dari puskesmas juga mengatakan kalau sudah tua rentan terpapar Virus Covid-19, tapi juga saya dengar kalau ada penyakit lain, seperti darah tinggi dan sebagainya juga gak boleh suntik vaksin takutnya jadi komplikasi, dan mengakibatkan meninggal, takut saya, jadi saya tidak mau di vaksin Covid-19.⁵²

Efek samping dari vaksinasi Covid-19 masih menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi sebagian masyarakat, terutama mengenai efeknya bagi kesehatan. Masih ada kelompok lansia yang seharusnya menjadi yang dikhususkan untuk divaksinasi karena kerentanan mereka terhadap paparan virus Covid-19, namun enggan untuk divaksin dikarenakan mereka lebih dulu terpapar isu hoaks yang mengatakan adanya efek samping yang berbahaya bagi kesehatan mereka bahkan dapat menyebabkan kematian.

Selain itu, vaksinasi Covid-19 bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja. Namun demikian, anak-anak yang divaksin harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali anak tersebut. Akan tetapi izin untuk melakukan vaksin ini susah untuk didapat karena ketakutan orang tua akan isu-isu negatif terhadap vaksin Covid-19. Seperti wawancara saya dengan seorang pelajar di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Aceh Besar:

Saya belum divaksin. Dari sekolah ada nya, anjuran untuk divaksin, tetapi orang tua tidak mengizinkan untuk divaksin, karena takut,

⁵² Wawancara dengan ibu rumah tangga yang berusia 65 tahun, pada tanggal 18 juli 2022

banyak isu yang beredar vaksin haram, bisa menyebabkan lumpuh, dan sebagainya yang berbahaya bagi tubuh, jadi orang tua saya tidak mengizinkan saya di vaksin.⁵³

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan, masih ada masyarakat yang percaya bahwa vaksin Covid-19 berbahaya, walaupun berbagai sosialisasi yang telah disampaikan mengenai keamanan vaksin Covid-19 dan upaya dari para stakeholder menghilangkan keragu-raguan tersebut melalui upaya mencontohkan vaksinasi. Akan tetapi, tetap saja sulit untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai hal negatif vaksinasi Covid-19. Ketakutan masyarakat terhadap bahaya vaksin masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di kabupaten Aceh Besar.

Selain dari masyarakat yang menunjukkan secara terang-terangan tidak mau divaksin, juga ada masyarakat yang tidak mau divaksin tetapi hanya ingin sertifikat vaksinnya saja. Mereka berusaha mendapatkan sertifikat tersebut secara illegal, hal ini dikarenakan adanya syarat administrasi yang ditetapkan pemerintah, seperti menghentikan pemberian dana sosial, serta ditakut-takuti tidak dapat lagi melakukan pengobatan dengan BPJS karena tidak ada sertifikat vaksin. Hal ini seperti yang dikatakan oleh seorang petani di kabupaten Aceh Besar:

Saya belum vaksinasi covid-19, tetapi saya sudah mendapatkan sertifikat vaksin. Tinggal menyerahkan KTP saja, sudah keluar sertifikat vaksinnya. Saya tidak mau divaksin, takut saya divaksin, tetapi saya dengar kalau tidak ada sertifikat vaksin, BLT tidak diberikan lagi, gak bisa berobat lagi di puskesmas secara gratis, kalau bayar kan susah juga kita penghasilan hari ini cukup buat hari ini, buat besok cari lagi besok, kalau berobat bayar kan susah juga. Jadi ada yang menawarkan tidak vaksin dapat sertifikat vaksin. Kita petani

⁵³ Wawancara dengan seorang pelajar sekolah menengah atas di kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 18 Juli 2022

*gak berjumpa banyak orang, di kebun sana tidak apa-apa menurut saya tidak vaksin.*⁵⁴

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan, masih ada masyarakat yang percaya bahwa vaksin Covid-19 berbahaya, walaupun informasi yang bertubi-tubi yang disampaikan, tapi susah mengubah persepsi masyarakat mengenai hal negatif vaksinasi Covid-19. Ketakutan masyarakat terhadap bahaya vaksin masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di kabupaten Aceh Besar.

Selain itu juga ada masyarakat yang tidak mau divaksin tetapi mendapatkan sertifikat secara ilegal. Hal ini ternyata bukan lagi hal yang tabu di Aceh Besar sendiri. Dengan hanya membawa KTP sudah dikeluarkannya sertifikat, dan sertifikat tersebut juga terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi di mana tidak ada perbedaan dengan sertifikat yang diperoleh oleh masyarakat yang benar-benar divaksin. Hal ini terjadi karena masyarakat memerlukan sertifikat tanpa peduli dengan kekebalan tubuh terhadap Covid-19. Strategi pemerintah mewajibkan sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai syarat administrasi, jika dilihat dari angka vaksinasi, memang mendorong tingginya tingkat vaksinasi, akan tetapi tidak mendorong peningkatan kesadaran masyarakat Aceh Besar terhadap pentingnya vaksinasi Covid-19. Dapat dilihat juga bagaimana oknum-oknum yang terlibat hanya menitikberatkan pada pentingnya ketercapaian angka vaksinasi yang tinggi bukan untuk benar-benar mendorong peningkatan kekebalan tubuh komunitas yang lebih tinggi terhadap Covid-19. Selain itu, tidak adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap oknum-oknum

⁵⁴ Wawancara dengan seorang petani di kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 18 Juli 2022

tersebut, mengesankan bahwa pemerintah sepertinya hanya berfokus pada peningkatan angka vaksinasi, bukan kesadaran dan kekebalan tubuh komunitas (herd immunity)

4.5. Faktor Yang Mempengaruhi Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Aceh Besar

Beragam faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19, baik faktor yang menghambat, serta faktor yang menyebabkan keraguan masyarakat dalam melakukan vaksinasi Covid-19, dan faktor yang membuat masyarakat ingin melakukan vaksinasi Covid-19.

4.5.1. Penyebaran Hoaks

Di awal pelaksanaan vaksinasi, hoaks lebih awal menjajah masyarakat mengenai resiko yang akan ditimbulkan vaksin Covid-19 yang dianggap berbahaya maupun isu mengenai kehalal-haraman vaksin Covid-19. Masyarakat lebih cenderung menerima informasi tanpa melakukan klarifikasi mendalam.⁵⁵

Informasi dan sosialisasi masih terus digalakkan oleh pemerintah maupun tenaga kesehatan untuk menghentikan penyebaran hoaks dan mengubah persepsi masyarakat. Penyebaran hoaks adalah salah satu penghambat terbesar yang menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi Covid-19, hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Mawardi Sekretariat Kesbangpol Aceh Besar:

⁵⁵ Handini, 2021. *Keterpaparan Hoax vaksin covid-19 dalam proses kognitif warganet Indonesia*. Jurnal: academic journal of da'wa and communication. Vol. 2(2).

Di awal, pemerintah mengalami kesusahan memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena anggapan masyarakat mengenai vaksin yang berbahaya, masyarakat masih menganggap kalau vaksin Cuma untuk kepentingan beberapa pihak.⁵⁶

Penyebaran isu hoaks adalah salah satu penyebab dan hambatan dalam implementasi vaksinasi Covid-19, hal ini juga dikatakan oleh ibu Sri Agustini penanggung jawab imunisasi dan vaksinator Covid-19 Puskesmas Darussalam:

Isu hoaks masih menjadi salah satu penyebab faktor penghambat vaksinasi di Aceh Besar, ada juga masyarakat yang belum melakukan vaksin karena adanya berita hoax, padahal kita tahu sendiri bahwa vaksinasi sangat penting untuk memutus mata rantai Covid-19 ini.⁵⁷

Hal ini dibenarkan, dengan wawancara yang saya lakukan dengan masyarakat, masyarakat tidak mau divaksin karena takut akan hal-hal negatif vaksin Covid-19, dan efek kesehatan dari penyakit yang sudah ada ditakutkan komplikasi, padahal implementor vaksinasi menjelaskan mengenai efek samping tersebut, dan melakukan skrining sebelum dilakukannya vaksinasi Covid-19, dan mendapatkan hasil apakah vaksinasi dilanjutkan atau ditunda. Namun demikian, isu hoaks yang mengatakan vaksin berbahaya tetap menjalar di masyarakat seperti yang dikatakan oleh seorang masyarakat yang berusia 65 tahun:

Saya belum vaksin, karena sudah tua diharuskan vaksin Covid-19 kan, saya dengar kalau ada penyakit lain, seperti darah tinggi dan sebagainya juga gak boleh suntik vaksin takutnya jadi komplikasi, dan mengakibatkan meninggal, takut saya, jadi saya tidak mau di vaksin Covid-19.⁵⁸

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Mawardi, S.E, sekretariat KESBANGPOL Kabupaten Aceh Besar. Pada tanggal 5 juli 2022

⁵⁷ Wawancara dengan ibu Sri Agustini, Penanggung jawab imunisasi dan vaksinator Covid puskesmas Darussalam, pada tanggal 15 juli 2022

⁵⁸ Wawancara dengan ibu rumah tangga yang berusia 65 tahun, pada tanggal 18 juli 2022

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan hoaks masih menjadi penyebab masyarakat enggan untuk divaksin. Walaupun sosialisasi terus dilakukan, sulit untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap isu bahaya vaksin Covid-19 yang sudah lebih dulu diterima masyarakat.

4.5.2. Pendidikan

Beragam penyebab respon masyarakat dalam penerimaan vaksinasi Covid-19, tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi terhadap efektivitas vaksinasi Covid-19, seperti yang dijelaskan oleh bapak Charlie Kapolres Aceh Besar:

tingkat pemahaman dan pendidikan saya rasa mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam mengambil informasi dan melakukan vaksinasi.⁵⁹

Selain itu pengetahuan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap penerimaan vaksinasi covid-19, hal ini disalmaikan oleh ibu Ulyani, Keuchik Miruk Taman:

Pengetahuan masyarakat mengenai bahaya Covid-19 dan pentingnya vaksinasi Covid-19 yang membuat masyarakat mau untuk divaksin Covid-19. dan kebanyakan pas kita buka gerai vaksinasi di depan kantor keuchik kebanyakan mahasiswa yang datang untuk vaksin, menurut data kami di gampong kami, tapi sosialisasi yang terus dilakukan membuat masyarakat percaya dan mau untuk melakukan Vaksinasi Covid-19.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan bapak AKBP Charlie Saputra Bustamam, Kapolres Aceh Besar, pada tanggal 31 juli 2022

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Ulyani, Keuchik Gampong Miruk Taman, Aceh Besar, pada tanggal 7 Desember 2022

Pemerintah menjadi contoh dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19, hal ini disampaikan oleh seorang mahasiswa:

Saya sudah vaksinasi covid-19, penting sekali vaksin, agar meningkatkan imun tubuh dan terhindar virus corona, dari isu hoaks ya pasti takut, apalagi katanya dapat menyebabkan kematian dan sebagainya, tapi kalau itu benar yang pertama mengalami ya pemerintah, dari nakse kan mereka yang pertama di vaksin.⁶¹

Vaksinasi dipercaya dalam meningkatkan kekebalan tubuh, hal ini juga disampaikan oleh seorang sarjana keperawatan:

Vaksin sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh terhadap covid-19. Informasi mengenai vaksin didapat dari kampus, di gampong, pak keuchik memberitahukan mengenai pentingnya vaksin, informasi juga bisa kita dapat dari media sosial. tidak ada alasan masyarakat tidak mau vaksin. saya tidak percaya informasi negatif mengenai vaksin.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Persepsi masyarakat terhadap efektifitas vaksin juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya Covid-19 dan pentingnya vaksinasi Covid-19. Masyarakat dengan pendidikan lebih tinggi mampu menyangkal hoaks terhadap hal-hal negatif mengenai vaksinasi Covid-19. Masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi cenderung percaya akan efektifitas vaksin Covid-19.

4.5.3. Bantuan Sosial

Selain dari efektifitas vaksin juga banyak masyarakat yang melakukan vaksin karena pembagian sembako dan bantuan sosial. Pembagian sembako salah satu

⁶¹ Wawancara dengan seorang mahasiswa, pada tanggal 9 desember 2022

⁶² Wawancara dengan seorang sarjana keperawatan. Pada tanggal 9 agustus 2022

pendongkrak dalam meningkatkan dan mengajak masyarakat dalam melakukan vaksinasi Covid-19, seperti yang dipaparkan oleh bapak Mawardi Sekretariat Kesbangpol Aceh Besar:

Di awal vaksinasi di kabupaten aceh besar sangat berat ya, tetapi kami berupaya dalam mengajak masyarakat untuk vaksin, salah satunya seperti pemberian sembako, dan hal lainnya, saya rasa cukup efektif.⁶³

Hal serupa juga dinyatakan oleh bapak Abdullah selaku Camat di Kecamatan Darussalam:

Vaksin sekarang kan gak cuman vaksin, kami bekerja sama dengan beberapa donatur dari pihak swasta atau adiknya pada pemberian sembako, dan sebagainya, kan sewaktu Covid-19 kemarin kita juga tau bahan makanan pokok seperti minyak, gula, beras naik, dengan pembagian sembako saya lihat masyarakat sangat antusias datang untuk melakukan vaksinasi covid-19 walaupun sembakonya tidak seberapa.⁶⁴

Masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang menetap di rumah dan kehilangan pekerjaan sehingga memperburuk ekonomi masyarakat sendiri, pemerintah dan implementor kebijakan menggunakan strategi pembagian sembako untuk masyarakat yang divaksin, menjadi pendongkrak naiknya persentase masyarakat yang divaksin, dengan pembagian sembako cukup membantu masyarakat walaupun sembakonya tidak seberapa, strategi pembagian sembako dinilai cukup berhasil karena masyarakat Aceh Besar sangat antusias dalam melakukan vaksinasi.

⁶³ Wawancara dengan bapak Mawardi, S.E, sekretariat KESBANGPOL Kabupaten Aceh Besar. Pada tanggal 5 juli 2022

⁶⁴ Wawancara dengan pak Abdullah, camat kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Pada tanggal 19 juli 2022

Selain karena pembagian sembako, juga pembagian bantuan sosial lainnya yang didapat masyarakat, tetapi harus memiliki sertifikat vaksinasi Covid-19, seperti dana BLT, hal ini disampaikan oleh bapak Abdullah selaku Camat di Kecamatan Darussalam:

Salah satu cara untuk meningkatkan vaksin, kami membuat masyarakat sadar, misal para penerima BLT, kalau tidak punya sertifikat vaksin berarti penerimaannya dihentikan, dari ini masyarakat mau melakukan vaksinasi covid-19.⁶⁵

Hal ini juga di sampaikan oleh seorang ibu rumah tangga mengenai sertifikat vaksin untuk mendapatkan uang BLT:

saya dengar kalau tidak melakukan vaksin dan tidak mempunyai sertifikat vaksin tidak bisa lagi berobat, kalau gak bisa berobat gratis kan harus bayar mana sanggup bayar, makanya lebih baik melakukan vaksinasi dan mendapatkan sertifikat dan tidak bisa mendapat BTL lagi, jadi saya vaksin.⁶⁶

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat vaksinasi di Aceh Besar adalah syarat mendapatkan BLT serta syarat administrasi tertentu yang memerlukan sertifikat dan strategi pemberian sembako yang dilakukan oleh pemerintah. Di satu sisi, strategi tersebut cukup efektif dalam mendorong masyarakat untuk mau divaksinasi. Namun demikian, strategi tersebut pada kenyataannya juga mendorong masyarakat untuk mencoba mendapatkan sertifikat vaksin secara ilegal, tanpa melalui proses vaksinasi terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena pertimbangan akan pentingnya sertifikat vaksin, bukan

⁶⁵ Wawancara dengan pak Abdullah, camat kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Pada tanggal 19 juli 2022

⁶⁶ Wawancara dengan seorang Ibu Rumah Tangga (55 tahun) pada tanggal 9 Desember 2022.

pada kebermanfaatan vaksin bagi kekebalan diri dan komunitas yang menjadi tujuan awal mengapa kebijakan vaksinasi ini diberlakukan.

Dari pemaparan di atas didapati bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 di kabupaten Aceh Besar di antaranya adalah isu hoaks yang menyebabkan respon masyarakat cenderung menolak vaksinasi Covid-19, tingkat pendidikan dan kesadaran yang mempengaruhi respon masyarakat sehingga mereka yakin dan mau divaksinasi karena percaya akan keefektifitasan vaksin, serta strategi pembagian sembako yang mendorong sebagian masyarakat untuk mau divaksinasi, namun pada sebagian masyarakat yang lain justru mendorong mereka untuk mencoba mendapatkan sertifikat vaksin tanpa divaksin terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan vaksinasi Covid-19 yang terjadi secara signifikan, menunjukkan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 yang berjalan cukup baik, tetapi tingginya vaksinasi belum menjamin bahwa seluruh masyarakat menyadari akan pentingnya vaksinasi Covid-19.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Aceh Besar Menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Aceh dengan tingkat vaksinasi Covid-19 yang tergolong rendah pada awal kebijakan vaksinasi Covid-19 ini diberlakukan. Tercatat bahwa tingkat vaksinasi di Kabupaten Aceh Besar baru mencapai 18.05 persen per Oktober 2021. Faktor utama rendahnya tingkat vaksinasi adalah penyebaran isu hoax mengenai kehalal haraman vaksin. Sebagian besar masyarakat Aceh Besar masih mempercayai bahwa vaksin Covid-19 haram. Selain itu, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap eksistensi dari virus Covid-19 sehingga mereka menganggap bahwa Covid-19 hanyalah akal-akalan pemerintah, mengenai dampak negatif vaksin Covid-19 yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa, kelumpuhan, dan berbagai efek samping lainnya terhadap orang-orang dengan penyakit bawaan seperti jantung, diabetes dan darah tinggi.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan tingkat vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar. Diantara upaya yang dilakukan pemerintah adalah berupaya menyebarkan informasi mengenai pentingnya vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat secara langsung dengan datang langsung ke rumah, atau di meunasah-meunasah dan secara tidak langsung dengan pemasangan spanduk, atau melalui media sosial seperti WA, instagram dan sebagainya. Pemerintah juga Melibatkan seluruh stakeholder, TNI, petugas kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di kabupaten Aceh

Besar, dengan menjadi yang pertama melakukan vaksinasi Covid-19 agar menjadi contoh untuk masyarakat dan meyakinkan masyarakat dalam melakukan vaksinasi Covid-19, aturan dan kebijakan vaksinasi Covid-19 adalah aturan yang ditetapkan oleh pusat dan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia tidak terkecuali kabupaten Aceh Besar. Dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 juga ada beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah dan implementor kebijakan diantaranya saat awal penyebaran informasi agak lambat karena wilayah kabupaten Aceh Besar yang tergolong Luas dan Menyebarkan dengan jumlah penduduk yang tergolong tinggi dan menyebabkan penyebaran informasi tidak berjalan dengan semestinya dan penyebaran hoaks lebih awal terpapar kepada masyarakat, vaksinasi juga diadakan langsung di desa-desa tetapi, hambatan yang dialami oleh petugas vaksinator adalah dalam penginputan data vaksinasi, jaringan yang terkendala karena kawasan di gampong atau pemadaman listrik yang berdampak pada jaringan internet, dan adanya oknum-oknum yang menyediakan sertifikat vaksinasi Covid-19 secara ilegal, masyarakat hanya perlu membawa KTP tanpa melakukan Vaksinasi Covid-19 dan sertifikat vaksinasinya ada juga terdaftar di aplikasi peduli lindungi bahwa orang tersebut telah melakukan vaksinasi Covid-19. Hal ini karena tuntutan untuk peningkatan capaian vaksin.

Masyarakat Aceh Besar dalam menanggapi Implementasi Kebijakan vaksinasi Covid-19 dilihat dari responnya terbagi menjadi 2 yaitu masyarakat pro terhadap vaksinasi dan kontra terhadap implementasi vaksinasi Covid-19. Dari respon ini ada penyebab mengapa masyarakat pro dan kontra terhadap vaksinasi Covid-19 karena

beberapa faktor, diantaranya isu Hoax yang beredar di masyarakat mengenai bahaya vaksinasi Covid-19, faktor pendidikan yang membuat masyarakat bersedia di Vaksin menyebabkan pola pikir dan menangkis Isu Hoaks mengenai bahaya vaksinasi Covid-19 dan Bantuan sosial, Selain dari efektifitas vaksin juga banyak masyarakat yang melakukan vaksin karena pembagian sembako dan dana sosial.

Peningkatan vaksinasi Covid-19 meningkat secara signifikan, tetapi tingginya vaksinasi tidak menjamin adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19, tingkat vaksinasi Covid-19 yang semakin meningkat secara signifikan hanyalah angka semata. Hal ini karena masyarakat mendapat sertifikat vaksinasi Covid-19 secara ilegal dan tidak adanya kesadaran mengenai pentingnya vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap Covid-19, seperti kegunaan vaksin yang seharusnya.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam tulisan karya ilmiah, yaitu:

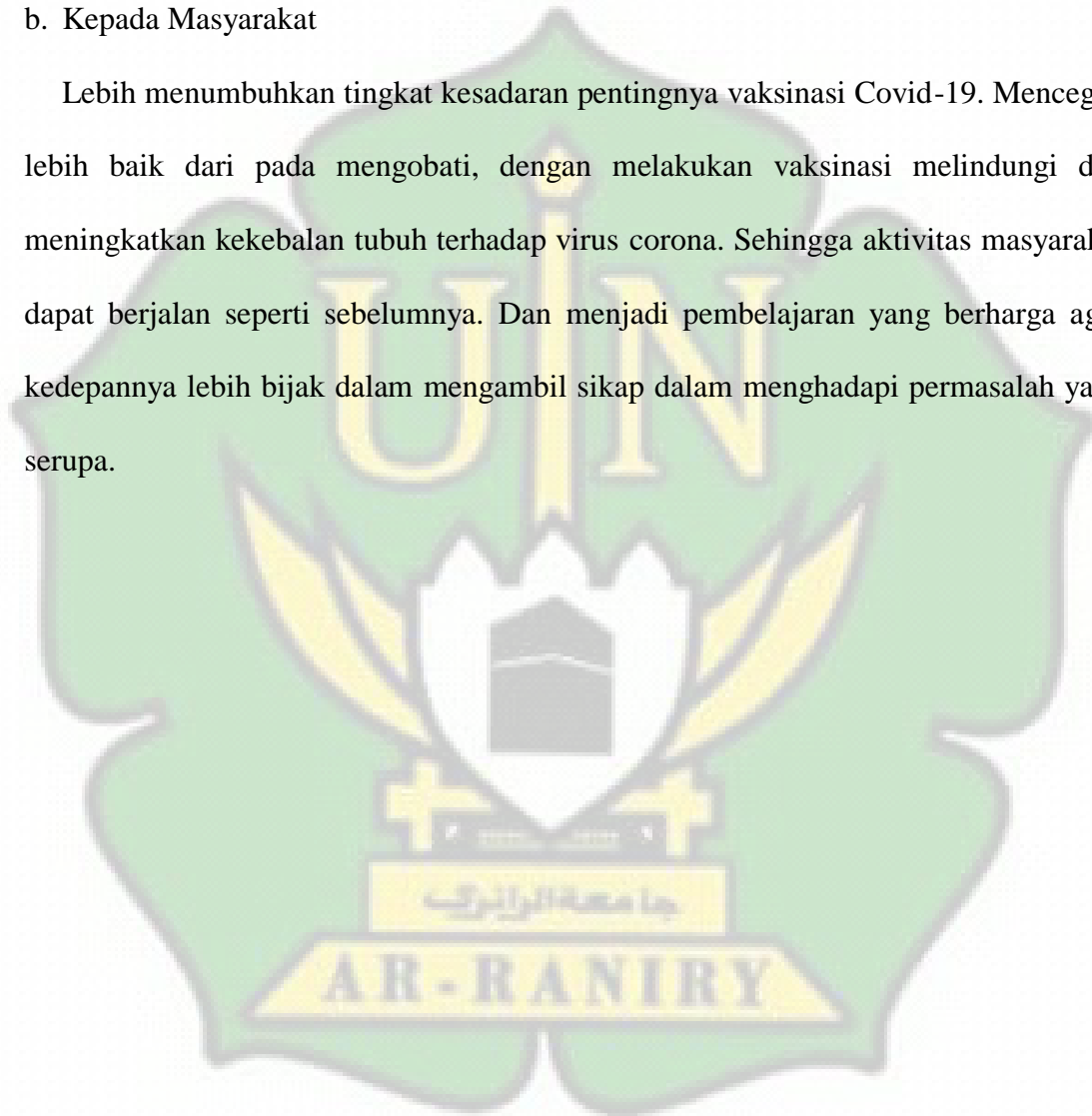
a. Kepada Pemerintah Dan Implementor Kebijakan

Implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Aceh Besar memang berjalan efektif, tetapi pemerintah jangan hanya memikirkan tingkat vaksinasi tetapi kesadaran masyarakat terhadap vaksin Covid-19. Jangan sampai terjadi adanya oknum yang menyediakan sertifikat vaksin Covid-19 secara ilegal tanpa melakukan vaksin, hal ini

harus sangat dipertimbangkan dan dipedulikan guna mencegah kasus Covid-19 kembali menanjak dan merugikan semua pihak.

b. Kepada Masyarakat

Lebih menumbuhkan tingkat kesadaran pentingnya vaksinasi Covid-19. Mencegah lebih baik dari pada mengobati, dengan melakukan vaksinasi melindungi dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus corona. Sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan seperti sebelumnya. Dan menjadi pembelajaran yang berharga agar kedepannya lebih bijak dalam mengambil sikap dalam menghadapi permasalahan yang serupa.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Aminah, S. roikon 2019. *Pengantar metode penelitian kualitatif ilmu politik*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Cooper, R Donald, C. William Emory. *Metode penelitian Bisnis, Alih Bahasa* Gunawan, Iman Nurmawan, (Jakarta:Erlangga,1999)
- Nugroho, riant. 2012. *Public policy*. Jakarta:Alex Media Komputindo.
- Suwartono, *Dasar-dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2014).
- Tukiran, tuniredja dan Hidayati Mustafidah. *Penelitian Kuantitatif (sebuah pengantar)*, (Bandung:Alfabeta,2014).
- Widiyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2004
- WJS. Purwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal: 895

B. Jurnal dan Skripsi

- Astuti, ning puji. 2021. *Persepsi masyarakat terhadap penerimaan vaksinasi covid 19*. Jurnal keperawatan 13(3).
- Asrijal, Bakri. DKK (2022). *Factor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi covid-19 di puskesmas makkasau*. Jurnal keperawatan Florence nightingale. No. 5(1).
- Dwi nurani, Tesis: “Analisis implementasi program bantuan operasional sekolah dasar negeri di kota Jakarta selatan”. Jakarta: UI,
- Niken, Niken. DKK. 2021. *implementasi kebijakan di kota Boyolal*. Jurnal Syntax Admiration 2(11). E- Issn: 2722-5356.
- Nurlailah, nurlailah. 2021. *Implementasi Kebijakan vaksinasi covid 19 di kabupaten Ogan Komering Ulu*. Jurnal: Dinamika. 1(2).

Novita, astrid. Dan Nur Rizki Ramadhani. 2021. *Webinar Vaksinasi covid 19 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat*. Jurnal pengabdian kesehatan masyarakat. 1(1).

Sukmana, Rika Apriani. DKK. 2021. *berjudul implementasi strategi komunikasi kesehatan dalam meyakinkan masyarakat untuk pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di Kabupaten Barito*. Jurnal: Sains sosial humaniora. 5(1). Issn: 409-419.

Wahidah, Idah. DKK. *Pandemic covid 19: analisis perencanaan pemerintah dalam berbagai upaya pencegahan*. Jurnal manajemen dan organisasi. 2020 (11).

Kania, Dewi. DKK. 2021. *Implementasi penyuluhan serta sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Kepada Warga RW 01 Kelurahan Rancanumpang*. Jurnal: proceedings Uin Sunan Gunung Jati Bandung. 1(8).

C. Internet

<https://acehbesarkab.bps.go.id>. Diakses melalui <https://acehbesarkab.bps.go.id>. Pada tanggal 13 september 2022, pada pukul 12.00 wib

<https://covid19.acehprov.go.id>. Diakses pada tanggal 29 september 2021

<https://Blogs.worldbank.org/sustainablecities/poor/people-respond-differently-stay-home-orders-heres-what-data-says>. pada tanggal 19 juli 2022, pukul: 20.22 wib

www.dari-suara.com, kemenkes ungkap alasan tingkat vaksinasi covid di aceh rendah, 16 september 2021. Diakses melalui situs: [https://darisuara.com/alasan vaksinasi covid diaceh rendah](https://darisuara.com/alasan-vaksinasi-covid-di-aceh-rendah) pada tanggal 29 september 2021

www.diskominfo.bandaacehkota.com, banda aceh tertinggi vaksinasi seaceh, 16 september 2021. Diakses melalui situs: <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/presiden-banda-aceh-tertinggi-vaksinasi-se-aceh/> pada tanggal 29 september 2021

www.m.merdeka.com, jumlah kematian covid seluruh dunia, 4 november 2021. Diakses melalui situs: <https://m.merdeka.com/jumlahkematiancovid19seluruhdunia> pada tanggal: 29 september 2021

www.cnnindonesia.com, Aceh dan NTT jadi wilayah vaksinasi covid-19 terendah, 18 April 2021. Diakses melalui situs: [https://www.cnnindonesia.com/aceh dan ntt jadi wilayah vaksinasi covid19 terendah](https://www.cnnindonesia.com/aceh-dan-ntt-jadi-wilayah-vaksinasi-covid19-terendah) pada tanggal 29 september 2021

LAMPIRAN 1

Pertanyaan Wawancara

- **Komunikasi (Pemerintah, Dinas Kesehatan, Implementor Kebijakan, Masyarakat)**

1. Apa saja peraturan pemerintah Aceh Besar yang berkaitan dengan vaksinasi Covid19?
2. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi di Aceh Besar?
3. Pendapat pemerintah Aceh Besar terhadap efektivitas kebijakan vaksinasi?
4. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan vaksinasi?
5. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan vaksinasi?
6. Respon masyarakat?
7. Vaksinasi diwajibkan atau tidak?
8. Adakah upaya penyebaran informasi yang dilakukan?
9. Dengan media apa saja?
10. Ada sosialisasi?
11. Seberapa banyak sosialisasi dilakukan?
12. Siapa saja yang menjadi sasaran kebijakannya?
13. Bagaimana respon masyarakat dalam sosialisasi vaksinasi Covid19?
14. Apakah ada SOP untuk pelaksanaan kebijakan vaksinasi ini? (minta SOP nya)

- **Sumber daya (pemerintah Kabupaten Aceh Besar – Dinas Kesehatan)**

1. Siapa saja pihak yang terlibat atau implementor dalam implementasi kebijakan ini?
2. Apa aja kompetensi yang dimiliki oleh para implementor tersebut?
3. Apakah personil yang dikerahkan untuk mengimplemetasikan kebijakan ini, sudah mencukupi? Ada berapa jumlah personil yang terlibat?
4. Bagaimana dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengimplementasian kebijakan ini? Apakah mencukupi?

- **Disposisi (Satgas Covid19, personil dari puskesmas, kepolisian)**

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai kebijakan vaksinasi tersebut? Apakah menurut bapak/ibu efektif?
2. Apakah ada petunjuk/arahan yang Satgas Covid19 berikan terkait dengan kebijakan vaksinasi tersebut?
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mendorong vaksinasi tersebut?
4. Berapa kali kegiatan tersebut dilakukan? Mungkin dalam sebulan ada berapa kali?

- **Struktur birokrasi (Implementor Kebijakan)**


1. Apakah ada SOP untuk pelaksanaan kebijakan vaksinasi ini? (minta SOP nya)
2. Apakah ada koordinasi yang dilakukan di antara para implementor kebijakan?
3. Apakah ada peran tertentu yang dimainkan oleh masing-masing implementor kebijakan vaksinasi tersebut?

Kepada masyarakat:

1. Menurut bapak/ibu, vaksinasi Covid19 penting tidak? Mengapa?
2. Apakah bapak/ibu sudah divaksin?
3. Mengapa masih ada yang tidak mau vaksin?
4. Apa yang membuat mereka, atau bapak/ibu mau divaksin?
5. Apakah masyarakat menerima informasi mengenai vaksinasi covid-19?
6. Dari manakah masyarakat menerima informasi mengenai vaksinasi covid-19?
7. Bagaimana peran implementor kebijakan dalam implementasi kebijakan vaksinasi?
8. Menurut bapak/ibu, apakah tingkat kesejahteraan mempengaruhi orang untuk mau vaksin atau tidak?

LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam
Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1503/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022
Lamp :-
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Bupati Aceh Besar
2. kepala Dinas kesehatan Aceh besar
3. Kapolres Aceh Besar
4. Puskesmas Darussalam,


Assalamu`alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JESIKA METIARA FITRI / 180801083**
Semester/Jurusan: VIII/Ilmu Politik
Alamat sekarang : Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Aceh Besar**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai :
31 Januari 2023*

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

 Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln Prof A. Majid Ibrahim Telp. (0651) 92193 Fax (0651) 92055 Kota Jantho 23911

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI :	<i>LIN KIRANIRY</i>	KODE : 420
TANGGAL SURAT	<i>27 / 6 -22</i>	NOMOR : 2155
TERIMA TANGGAL	<i>22 / 6 -22</i>	TGL. PENYELESAIAN
PERIHAL : <i>konolitan ilmiah indrisisvee</i>		
KLASIFIKASI : A. RAHASIA B. PENTING/SEGERA C. BIASA		
INSTRUKSI DAN INFORMASI		
1 BUPATI		<i>Yl. Kaban Kesg psl</i> <i>Si tudoulayati</i> <i>28 / 6 2022</i>
2 WAKIL BUPATI		
3 SEKDA ✓		
4 STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK		
5 STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		
6 STAF AHLI BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KERJASAMA		
7 ASISTEN I (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)		
8 ASISTEN II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)		
9 ASISTEN III (Asisten Administrasi Umum)		
10 BAGIAN PEMERINTAHAN		
11 BAGIAN KEISTIMEWAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
12 BAGIAN HUKUM		
13 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
14 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
15 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
16 BAGIAN UMUM		
17 BAGIAN ORGANISASI		
18 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
19 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN		

Surat Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KESEHATAN**

Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim Kota Jantho Telp. (0651) 92186 Fax.(0651) 92011
Email : dlnkes_ab@yahoo.co.id Kode Pos : 23917

Nomor : 070/ 1278 / 2022
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah

Kota Jantho, 28 Juni 2022

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan
Kelembagaan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry
di
Tempat

Dengan Hormat,

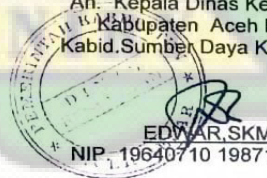
Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-1503/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022 tanggal 27 Juni 2022, perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, pada prinsipnya dipihak kami tidak berkeberatan serta dapat mengizinkan untuk melakukan Penelitian Ilmiah kepada:

Nama : Jesika Metiara Fitri
Nim : 180801083
Judul : Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Skripsi Kabupaten Aceh Besar

Untuk Kelancaran Kegiatan dimaksud, yang bersangkutan dapat berkoordinasi dengan Instansi setempat.
Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

An. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Besar
Kabid. Sumber Daya Kesehatan



EDWAR SKM
NIP. 19640710 198711 1 004

Tembusan:

1. Camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar
2. Kepala Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar

LAMPIRAN 3. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan secretariat
KESBANGPOL Aceh Besar bapak
Mawardi



Wawancara dengan Kapolres Aceh Besar
Bapak Charli Saputra



Wawancara dengan ketua P2P dan
Imunisasi Dinas Kesehatan dan
Sekretariat Satgas Covid-19 Aceh Besar
Ibu Intan



Wawancara dengan Ketua Imunisasi dan
Satgas Covid-19 Puskesmas Darussalam
Aceh Besar Ibu sri Agustini



Wawancara Dengan Bapak Yuslizar
selaku Camat Kecamatan Kuta Baro



Wawancara Dengan Ibu Ulyani Keuchik
Miruk Taman Aceh Besar

